

**ANALISIS INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHINYA
(Studi Kasus di Jawa Tengah)**

Tesis



**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Magister Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan
Universitas Diponegoro Semarang**

**Oleh :
PRATAMA HERU KUSPRIYADI
C4B 000 121**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS
ANALISIS INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHINYA
(STUDI KASUS DI JAWA TENGAH)

Disusun Oleh

PRATAMA HERU KUSPRIYADI
C4B000121

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 15 Juni 2004
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing utama




Drs. Bagio Mudakir, MT
NIP. 130 937 140

Anggota Penguji




Drs. Mudji Rahardjo, SU
NIP. 130 681 637

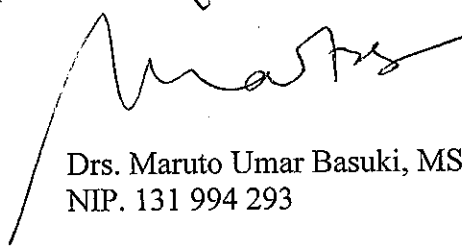
Pembimbing Pendamping



Drs. AD. Uphadi, MS
NIP. 131 696 206



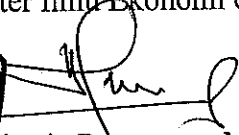
Dra. Herwijati RH, MS
NIP. 130 937 139



Drs. Maruto Umar Basuki, MSi
NIP. 131 994 293

Semarang, Juni 2004

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan



Dr. Wisetia Poerwono, MSc
NIP. 130 812 321

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juli 2004

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Heru Kuspriyadi', written over a large, empty, teardrop-shaped outline.

(P. Heru Kuspriyadi)

ABSTRACT

Investment play a part important in supporting development process in area. This investment will cause to be formed its area capital, this matter represent logical consequence from the limited budget had by local government in running development program. One of the interesting area to be careful and analysed in activity of development of its bearing with investment / cultivation of good capital of cultivation of foreign capital (PMA) and also cultivation of home affairs (PMDN) is Central Java province. pursuant to data growth of investment value in some province exist in minus Java existing Fact Yogyakarta enough surprise. This matter because Central Java in the reality occupy last ranking in list spreading of investment agreed by government. Implication farther than the mentioned is in de form of critical analysis an study in the form of question concerning what factors in fact having an effect on to existence of foreign and also domestic good private sector investment in area especially in this case Central Java Province. On the basis of condition of objective that's research concerning this investment require to be conducted.

Target performing of this research to analyse influence of real rate of interest storey level, PDRB, realize expenditure of APBD and availability of labor force to investment, either through by self and also at a time. Data type which use in this research is data of sekunder. Analysis method the used is Method of Ordinary Least Square (OLS) Partial Adjustment Model (PAM) and Classic Test Assumption.

Pursuant to result of analysis obtained by Coefficient of regresi elasticity and equal to 0,618 in short-range, its meaning that gone up it PDRB equal to 1% ceteris paribus will improve investment equal to 0,618%. While on a long time term where coefficient of regresi equal to 23.572 meaning increase of PDRB equal to 1% will improve enthusiasm have investment to equal to 23.572% coefficient of Regresi short-range equal to 3.771 giving indication that elasticity of APBD to investment have the character of inelastis. On a long term elasticity expenditure of government to investment still have the character of inelastis 3.771%. Coefficient short-range this positive variable at number 0,628. This matter indicate that in the reality the availability of labor force have an effect on positively to enthusiasm all investor for the investment Long-Range coefficient of labor force variable equal 1.046. Matter this means for few year to the fore all investor tend to will be more using many manpower (capital human) in running its investment. Coefficient short-range mount real rate of interest equal to 1,634 compared to Smallest of other variable coefficient value. Long-Range coefficient real rate of interest storey level equal to its meaning that on a long term ever also change of rate of interest storey level do not have an effect on big to all investor in taking decision for the investment of, rate of interest to promotion of ranking equal to 1% will only degrade investment equal to 2.723%.

ABSTRAKSI

Investasi memegang peranan penting dalam mendukung proses pembangunan di daerah. Investasi ini akan menyebabkan terbentuknya modal daerah, hal ini merupakan konsekuensi logis dari terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Salah satu daerah yang menarik untuk dicermati dan dianalisis dalam kegiatan pembangunan kaitannya dengan investasi / penanaman modal baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman dalam negeri (PMDN) adalah propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data perkembangan nilai investasi di beberapa propinsi yang ada di pulau Jawa minus Yogyakarta fakta yang ada cukup mengejutkan. Hal ini karena Jawa Tengah ternyata menempati ranking terakhir dalam daftar penyebaran investasi yang disetujui pemerintah. Implikasi lebih jauh dari hal tersebut adalah berupa telaah dan analisa kritis dalam bentuk pertanyaan mengenai faktor-faktor apa sesungguhnya yang berpengaruh terhadap keberadaan investasi swasta baik domestik maupun asing disuatu daerah terutama dalam hal ini propinsi Jawa Tengah. Atas dasar kondisi obyektif itulah penelitian mengenai investasi ini perlu dilakukan.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dari tingkat suku bunga riil, PDRB, pengeluaran pemerintah dan ketersediaan tenaga kerja terhadap investasi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara serentak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah Metode Ordinary Least Square (OLS), Partial Adjustment Model (PAM) dan Uji Asumsi Klasik.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh Koefisien regresi dan elastisitas sebesar 0.618 dalam jangka pendek, artinya bahwa dengan naiknya PDRB sebesar 1 persen, ceteris paribus akan meningkatkan investasi sebesar 0.618 persen. Sedangkan dalam jangka panjang dimana koefisien regresi sebesar 23.572 berarti kenaikan PDRB sebesar 1 persen akan meningkatkan minat berinvestasi sebesar 23.572 persen. Koefisien regresi jangka pendek sebesar 2.263 persen. Sedangkan dalam jangka panjang dimana koefisien regresi sebesar 3.771 berarti kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 persen akan meningkatkan minat berinvestasi sebesar 3.771 persen. Koefisien jangka pendek variable tenaga kerja positif pada angka 0,628. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata ketersediaan tenaga kerja berpengaruh secara positif terhadap minat para investor untuk berinvestasi. Koefisien jangka panjang variabel tenaga kerja sebesar 1.046. Hal ini berarti untuk beberapa tahun kedepan para investor cenderung akan lebih banyak menggunakan tenaga manusia (human capital) dalam menjalankan investasinya. Koefisien jangka pendek tingkat suku bunga riil sebesar - 1,634. Koefisien jangka panjang tingkat suku bunga riil sebesar - 2.723 menunjukkan bahwa dalam jangka panjang perubahan tingkat suku bunga akan berpengaruh terhadap para investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi, kenaikan tingkat suku bunga sebesar 1 persen akan menurunkan investasi sebesar 2.723 persen.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan hidayah-Nya serta bantuan maupun bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Tesis dengan judul "ANALISIS INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA". Maksud dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai derajat S-2 pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.

Bimbingan, dorongan dan bantuan dari para dosen pembimbing, rekan-rekan serta ketulusan hati dan keramahan dari banyak pihak, sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini dengan harapan agar dapat mencapai hasil sebaik mungkin. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

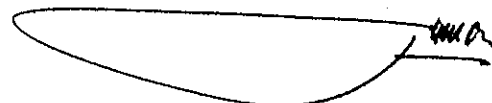
1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. H.M Moch. Chabachib, Msi, Akt. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Drs. Bagio Mudakir, MT. selaku Dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.

4. Bapak AD Uphadi, MS. selaku Dosen pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang khususnya Bapak dan Ibu Dosen pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
5. Segenap rekan-rekan mahasiswa pada Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
7. Seluruh staf administrasi secretariat Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.
8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan, bimbingan, petunjuk, saran dan semua fasilitas yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Semarang, Mei 2004

Penulis



Pratama Heru Kuspriyadi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstraksi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	11
2.1.1 Landasan Teori	11
2.1.2 Perilaku Investasi dan Pendapatan Nasional (PDB)	14
a. Model Akselerator	14
b. Model Akselerator yang Fleksibel	15
2.1.3 Suku bunga dan Indeks Harga Sebagai Determinan Investasi	17
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah dan implikasinya Terhadap Investasi	19
2.1.5 Hubungan Tenaga Kerja dan Investasi	21
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemikiran	23
2.4 Hipotesis	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	26
3.2 Jenis dan Sumber Data	27
3.3 Metode Pengumpulan Data	27

3.4	Metode Analisis	28
3.4.1	Metode Ordinary Least Square (OLS) dan partial Adjustment Model (PAM).....	28
3.4.2	Uji Asumsi Klasik	32
1.	Uji Multikolinearitas	32
2.	Uji Heteroskedastisitas	32
3.	Uji Autokorelasi	33
BAB IV GAMBARAN UMUM		35
4.1	Kondisi Wilayah Jawa Tengah.....	35
4.2	Investasi di Jawa Tengah	35
4.3	Sumber Dana Investasi.....	37
4.4	Sektor Pembiayaan.	37
4.5	Alokasi Dana Investasi.....	39
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		57
5.1	Hasil Estimasi Partial Adjustment Model (PMA) Tingkat Investasi di Propinsi Jawa Tengah	57
5.2	Pengujian Secara Parsial	60
5.3	Pengujian Secara Serentak	63
5.4	Analisis Koefisien Jangka Panjang	63
5.4.1	Pengaruh PDRB Terhadap Investasi.....	64
5.4.2	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi	65
5.4.3	Pengaruh Tenaga kerja Terhadap Investasi	65
5.4.4	Pengaruh tingkat Suku Bunga Riil Terhadap Investasi	66
5.5.	Uji Penyimpangan Klasik	66
5.5.1	Uji Multikolinearitas.....	67
5.5.2	Uji Heteroskedastisitas	67
5.5.3	Uji Autokorelasi.....	68
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN		69
6.1	Kesimpulan	69
6.2	Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Perkembangan Rencana dan Realisasi PMA Di Propinsi Jawa Tengah Periode 1997-2003	3
Tabel 1.2 : Perkembangan Rencana dan Realisasi PMDN Di Propinsi Jawa Tengah Periode 1997-2003	4
Tabel 1.3 : Data Penyebaran Investasi (PMDN) yang Disetujui Pemerintah Antar Propinsi Di Pulau Jawa (Milyar Rp.).....	5
Tabel 1.4 : Data Penyebaran Investasi (PMA) yang Disetujui Pemerintah Antar Propinsi Di Pulau Jawa (Juta \$).....	6
Tabel 4.1 : Investasi Pembangunan Daerah Jawa Tengah PELITA V Dan REPELITA VI (Dalam Milyar Rupiah).....	42
Tabel 4.2 : Investasi Dari Semua Sumber Di Jawa Tengah Selama REPELITA VI (Dalam Milyar Rp.).....	47
Tabel 4.3 : Investasi Dari Semua Sumber Di Jawa Tengah Selama REPELITA VI (Dalam Milyar Rp.).....	48
Tabel 4.4 : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Dalam REPELITA Daerah Jawa Tengah (Dalam Milyar Rupiah).....	51
Tabel 4.5 : Investasi Swasta Non Fasilitas Di Jawa Tengah Dalam REPELITA VI	56
Tabel 5.1 : Hasil Estimasi.....	57
Tabel 5.2 : Nilai t_{hitung}	61
Tabel 5.3 : Hasil Estimasi Parameter Pertumbuhan Jangka Panjang	63
Tabel 5.4 : Perbandingan Nilai R^2	67
Tabel 5.5 : Signifikansi Uji Park	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kurva Permintaan Investasi Agregat.....	18
Gambar 2.2 : Bagan Kerangka Pemikiran.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional akan memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (penjelasan umum atas UU No. 25. 1999). Pembangunan daerah juga sangat erat kaitannya dengan proses desentralisasi pembangunan yang berkembang pada saat ini, sehingga usaha-usaha untuk mencapainya perlu senantiasa ditingkatkan agar laju pertumbuhan antar daerah semakin seimbang dan serasi sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia (Priyono Tjiptoheriyanto, 1997). Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan daerah sendiri yaitu selain untuk meningkatkan produksi, pendapatan, menjaga kestabilan nasional juga untuk meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah nusantara, dan diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja (T Gilarso, 1999).

Kata kunci untuk pembangunan termasuk pembangunan di daerah adalah penanaman modal atau investasi. Menurut Boulden (1988), penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan sehingga investasi pada hakikatnya juga merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Urgensi tentang pembentukan modal di daerah mendapat perhatian dan penekanan oleh Roeslan Zaris (1987) yang menyatakan bahwa investasi swasta memainkan peranan penting dalam membentuk pola pembangunan di daerah. Investasi ini akan menyebabkan terbentuknya modal daerah (*regional capital formation*). Hal ini merupakan konsekwensi logis dari terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Dari beberapa daerah di tanah air, dalam profil Propinsi Republik Indonesia (1992) disebutkan bahwa salah satu daerah yang menarik untuk dicermati dan dianalisis dalam kegiatan pembangunan kaitannya dengan investasi / penanaman modal baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman dalam negeri (PMDN) adalah propinsi Jawa Tengah.

Partisipasi dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan Jawa Tengah mulai dominan sejak pelita III (Profil Propinsi Republik Indonesia, 1992). Total investasi mencapai separuh lebih dari keseluruhan investasi pembangunan selama periode tersebut yang bernilai sekitar 8 triliyun atau rata-rata seperlima dari total PDRB selama lima tahun pelita III. Besarnya nilai investasi baik PMA maupun PMDN tersebut terutama sebagai dampak kebijakan *one stop service* dalam pengurusan perijinan berikut sejumlah kemudahan bagi para investor yang diterapkan secara menyeluruh di setiap wilayah sejak 1984.

Perkembangan rencana dan realisasi PMA di Jawa Tengah dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 cenderung mengalami fluktuatif, keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1
PERKEMBANGAN RENCANA DAN REALISASI PMA
DI PROPINSI JAWA TENGAH PERIODE 1997 – 2003

No	Tahun	PMA			
		Rencana (Milyar)	Persentase (%)	Realisasi (Milyar)	Persentase (%)
1	1997	2.221,52	38.6	432,33	37
2	1998	3.072,20	53.4	213,29	18.3
3	1999	127,85	2.3	159,66	13.7
4	2000	72,07	1.3	163,60	14
5	2001	96,68	1.7	66,85	5.8
6	2002	91,77	1.6	73,44	6.3
7	2003	80,02	1.4	60,68	5.2
	Jumlah	5.762,11	100	1.169,85	100

Sumber : BKPMI, Tahun 2003

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui tentang perkembangan rencana dan realisasi penanaman modal asing di Jawa Tengah dari tahun 1997-2003 dimana pada tahun 1997 sumber penerimaan pembiayaan pembangunan yang berasal dari PMA direncanakan sebesar US\$ 2.221,52 Juta, tercatat nilai PMA yang terealisasi sebesar US\$ 432,33 Juta, kemudian pada tahun 1998 nilai PMA yang terealisasi turun lebih dari dua kali lipat yakni menjadi US\$ 213,29 Juta, penurunan ini disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang disertai dengan situasi politik dan keamanan yang kurang kondusif yang masih melanda Indonesia sehingga investor asing jadi enggan untuk melakukan investasi. Pada tahun 2000 realisasi PMA mengalami peningkatan menjadi US\$ 163,60 Juta yang semula pada tahun 1999 hanya sebesar US\$ 159,66 Juta. Peningkatan ini disebabkan karena kondisi perekonomian dan situasi politik dan keamanan yang sudah membaik / kondusif.

Sedangkan perkembangan rencana dan realisasi PMDN di Jawa Tengah dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2
PERKEMBANGAN RENCANA DAN REALISASI PMDN
DI PROPINSI JAWA TENGAH PERIODE 1997 – 2003

No	Tahun	PMDN			
		Rencana (Milyar)	Persentase (%)	Realisasi (Milyar)	Persentase (%)
1	1997	7.406,63	34.2	1.960,00	30.4
2	1998	2.482,40	11.5	941,00	14.6
3	1999	1.308,71	6	300,58	4.7
4	2000	2.451,20	11.3	666,08	10.4
5	2001	2.912,20	13.5	756,17	11.7
6	2002	1.541,26	7	777,12	12
7	2003	3.607,65	16.7	1.062,16	16.5
	Jumlah	21.710,05	100	6.463,11	100

Sumber : BKPM, Tahun 2004

Dari Tabel 1.2 dapat diketahui realisasi PMDN di Jawa Tengah pada tahun 1997 mencapai 1.960,00 milyar dan menurun secara drastis tepatnya pada tahun 1998 menjadi 941,00 milyar. Hal ini berarti dalam waktu satu tahun PMDN menurun lebih dari dua kali lipat. Realisasi PMDN dari tahun 1997 sampai dengan 2002 cenderung fluktuatif walaupun ada trend meningkat. Sebagai contoh realisasi PMDN pada tahun 1999 hanya mencapai 300,58 milyar dan meningkat pada tahun berikutnya yakni tahun 2000 lebih dari dua kali lipat yakni menjadi 666,08 milyar.

Perkembangan penanaman modal atau investasi baik asing maupun domestik di Jawa Tengah akan lebih baik jika dibandingkan dengan propinsi di luar pulau Jawa. Akan tetapi, berdasarkan data perkembangan nilai investasi di beberapa propinsi yang ada di pulau Jawa minus Yogyakarta fakta yang ada cukup mengejutkan. Hal ini karena Jawa Tengah ternyata menempati ranking

terakhir dalam daftar penyebaran investasi yang disetujui pemerintah (Tabel 1.3 dan 1.4).

TABEL 1.3
DATA PENYEBARAN INVESTASI (PMDN) YANG DISETUJUI
PEMERINTAH ANTAR PROPINSI DI PULAU JAWA (MILYAR Rp.)

Tahun	Jakarta	Ja - Bar	Ja - Teng	Ja - Tim
1979	83,7	204,6	40,4	53,3
1980	102,7	246,2	35,7	62,2
1981	524,4	489,8	75,4	263,6
1982	629,0	773,7	160,0	611,4
1983	890,9	1.756,2	1.330,6	873,5
1984	536,7	601,8	130,3	294,5
1985	630,5	999,8	245,5	405,7
1986	441,8	1.113,8	205,5	321,3
1987	776,7	3.853,7	565,5	499,1
1988	1.031,4	5.640,4	870,3	1.025,7
1989	1.419,6	9.275,0	891,3	2.821,5
1990	3.272,3	27.333,4	5.700,3	2.424,6
1991	3.604,4	13.511,7	3.634,4	3.908,2
1992	5.722,5	13.500,1	1.507,2	3.817,8
1993	8.828,9	11.681,8	2.768,1	3.778,6
1994	5.968,3	15.863,0	5.766,9	8.444,9
1995	11.645,2	19.338,0	5.499,0	5.285,3
1996	14.395,5	19.213,5	3.366,9	6.573,9
1997	8553,5	37.423,5	5.764,2	11.704,0
1998	4756,6	18.645,8	2.897,7	8.375,4
1999	3982,2	15.647,4	2.318,5	6.653,7
2000	3567,4	14.245,7	2.181,3	6.569,4
2001	4721,8	16.348,3	3.657,5	7.346,2
2002	6345,2	18.934,1	5.235,2	9.765,8

Sumber : Indikator Ekonomi, BPS, 2003

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dibandingkan penyebaran investasi PMDN antar propinsi di Pulau Jawa termasuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana penyebaran investasi (PMDN) di Jawa Tengah dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2002 jumlahnya paling kecil jika dibandingkan dengan propinsi yang lain yang ada di Pulau Jawa.

TABEL 1.4
DATA PENYEBARAN INVESTASI (PMA) YANG DISETUJUI
PEMERINTAH ANTAR PROPINSI DI PULAU JAWA (Juta \$)

Tahun	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
1979	209,8	117,7	5,8	40,9
1980	103,6	226,0	20,1	39,6
1981	205,2	269,7	-	97,5
1982	894,1	287,4	16,7	15,6
1983	775,1	1.307,5	24,6	71,6
1984	269,1	758,3	9,6	57,2
1985	257,5	450,2	2,2	69,6
1986	258,2	422,2	57,2	9,5
1987	440,4	605,8	32,3	208,3
1988	335,4	1.069,4	25,1	236,9
1989	521,2	1.476,3	1.702,7	330,5
1990	1.651,5	3.691,7	110,7	972,8
1991	4.216,6	2.376,2	130,6	426,5
1992	1.131,4	4.497,8	42,5	281,8
1993	1.669,1	2.508,0	50,3	2.285,8
1994	1.832,3	4.446,3	1.830,2	6.247,3
1995	4.030,8	12.474,4	726,7	10.207,5
1996	4.403,9	7.760,1	3.273,7	2.401,7
1997	6.136,1	7.973,3	2.295,7	4.215,6
1998	4.287,6	3.398,7	1.756,4	2.678,3
1999	3.856,2	2.805,9	1.021,8	2.189,7
2000	3.201,7	2.589,5	1.584,5	2.765,5
2001	4.804,2	3.275,2	2.938,1	3.570,2
2002	5.261,8	4.602,7	3.682,6	4.703,8

Sumber : Indikator Ekonomi, BPS, 2003

Berdasarkan Tabel 1.3 dan Tabel 1.4, maka hal ini cukup ironis bagi Propinsi Jawa Tengah mengingat berbagai keunggulan komperatif potensial yang dimiliki propinsi ini dalam beberapa hal, misalnya sumber daya manusia (angkatan kerja) melimpah yang jika dilihat berdasarkan tingkat upah relatif murah dan deregulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah yang intinya memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas bagi investor, selain tentu saja pemilikan sumber daya alam yang relatif bersaing (sama melimpah) jika dibandingkan dengan propinsi lain di pulau Jawa.

Implikasi lebih jauh dari hal tersebut adalah berupa telaah dan analisa kritis dalam bentuk pertanyaan mengenai faktor-faktor apa sesungguhnya yang

berpengaruh terhadap keberadaan investasi swasta baik domestik (dalam negeri) maupun asing disuatu daerah terutama dalam hal ini propinsi Jawa Tengah. Atas dasar kondisi obyektif itulah penelitian mengenai investasi ini perlu dilakukan.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah adalah konteks dari penelitian, alasan mengapa penelitian diperlukan, dan petunjuk yang mengarahkan tujuan penelitian. Pedoman dalam perumusan masalah adalah mengungkap fenomena apa dibalik gejala masalah tersebut dan mengidentifikasi penyebab utamanya.

Fenomena dan kenyataan yang ada tentang investasi swasta di Jawa Tengah menunjukkan bahwa sebagai lokomotif pembangunan merupakan suatu variabel yang tidak stabil dan dipengaruhi variabel-variabel lain. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Goodwin yaitu adanya siklus konjungtur (Gardner Ackley, 1961). Dikemukakan oleh Goodwin bahwa investasi akan mengalami titik puncak (peak) dan menurun ketika stok kapital mencapai tingkat yang sama dengan stok optimum, hal mana mengakibatkan turunnya investasi, pendapatan dan stok optimum, begitu juga pendapat Duessenbery dalam Gardner Ackley (1961) yang mengatakan bahwa laba ditahan untuk investasi merupakan fungsi dari pendapatan dan stok kapital yang dipengaruhi indeks harga atau inflasi. Ada juga teori yang dikemukakan oleh Hawtney dalam Gardner Ackley (1961) bahwa investasi merupakan fungsi dari suku bunga, disamping pendapatan nasional dan stok kapital (dipengaruhi inflasi). Dikatakan oleh Hawtney turunnya suku bunga merupakan sumber munculnya periode kepulihan (survival) bagi investasi (Gardner Ackley, 1961).

Keberadaan tenaga kerja disatu sisi akan bisa merangsang keinginan untuk berinvestasi. Apalagi dengan pertimbangan bahwa investasi yang dilakukan akan lebih efisien jika bersifat padat karya. Perubahan paradigma tentang peranan penduduk sebagai SDM dalam pembangunan termasuk investasi mulai dilirik. Paradigma baru ini mencoba menempatkan tenaga kerja bukan sebagai obyek yang harus diserap oleh perekonomian, tetapi justru melihat berapa sumbangan yang dapat dihasilkan oleh tenaga kerja dengan mutu tertentu kepada perekonomian (Iwan Jaya Azis, 1985). Berbeda dengan literatur klasik, dalam literatur-literatur modern, penduduk dipandang sebagai pemacu pembangunan. Berlangsungnya kegiatan produksi adalah berkat adanya orang yang membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Konsumsi dari penduduk inilah yang menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif yang tidak lain adalah investasi berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan (Dumairy, 1999), hal ini akan menimbulkan polemik seputar keberadaan tenaga kerja terhadap investasi.

Dengan menggunakan berbagai pendekatan di atas maka batasan dari masalah yang hendak dianalisa dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh dan tingkat signifikansi dari tiap-tiap variabel serta keseluruhan variabel terhadap investasi seperti tingkat suku bunga riil dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Begitu pula dengan pengaruh pengeluaran pemerintah dan ketersediaan tenaga kerja. Sedangkan alasan pemilihan jangka waktu penelitian dari tahun 1980 – 2003 berkaitan dengan pernyataan sebelumnya bahwa peranan sektor swasta

dalam pembangunan daerah melalui investasi di Jawa Tengah mulai dirasakan meningkat pada awal Pelita III disamping kenyataan bahwa selama periode tersebut sampai 1997 perekonomian Indonesia relatif stabil, dan mengalami krisis ekonomi setelah tahun 1998.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh tingkat suku bunga riil terhadap investasi.
2. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap investasi.
3. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap investasi.
4. Menganalisis pengaruh ketersediaan tenaga kerja terhadap investasi.
5. Menganalisis pengaruh tingkat suku bunga riil, PDRB, pengeluaran pemerintah, ketersediaan tenaga kerja secara serentak terhadap investasi swasta selama periode penelitian.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengembangan pengetahuan akademis, disamping membandingkan kegiatan penelitian yang ada sebelumnya di daerah lain maupun sebagai bahan penunjang bagi penelitian selanjutnya.
2. Bagi kalangan pengambil kebijakan (*policy marker*) baik dari pemerintah atau pihak swasta, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan keputusan dalam berinvestasi.

1.4. Sistematika Penulisan

- Bab I, Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian termasuk sistematika penulisan.
- Bab II, Menyajikan konsep dan landasan teori mengenai investasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadapnya. Sebagai perbandingan disajikan pula hasil-kasil penelitian sebelumnya guna mendukung kerangka pemikiran dan hipotesis.
- Bab III, menyajikan metodologi penelitian yang mencakup variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian
- Bab IV, Berisi gambaran umum mengenai perkembangan investasi di Jawa Tengah dengan berbagai sudut pandang. Untuk memudahkan dan agar lebih sistematis gambaran tersebut disajikan per-5 tahun.
- Bab IV, Merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan, pengujian dan analisis menggunakan persamaan-persamaan regresi yang kemudian diintropeksi lebih lanjut.
- Bab V, merupakan bab penutup dimana akan ditarik kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan *preliminary study* yang bertujuan mencari data dan informasi tentang masalah penelitian. Landasan teori dilakukan dengan mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu maupun mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Investasi adalah pengeluaran oleh produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa dengan tujuan sebagai penambahan stok barang. Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi adalah pembentukan modal tetap domestik bruto (Boediono, 1986). Investasi juga diartikan sebagai upaya penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada saatnya nanti pemilik modal akan memperoleh hasil dari penanaman modal tersebut (T. Gilarso, 1991 :3).

Investasi sebagai pendorong perkembangan ekonomi meliputi investasi dalam pembangunan pengetahuan teknik dan keahlian. Selain itu juga termasuk sumber-sumber yang meningkatkan tenaga produksi yang semuanya membutuhkan keahlian pelakunya. Dengan kata lain dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang, fungsi investasi yang meningkatkan produktivitas itu tidak saja berwujud pabrik dan perlengkapan lainnya, tapi juga berwujud *human capital* (Irawan Suparmoko, 1992).

Isu mengenai investasi sering mendapat banyak tanggapan oleh para teoritis dan praktisi pembangunan. Pendapat tentang pentingnya investasi dalam menunjang pembangunan khususnya di negara berkembang ini dimulai dengan ditemukannya model pertumbuhan setelah perang Dunia II yaitu pada tahun 1950-an dan 1960-an oleh beberapa ahli pembangunan seperti Rostow dan Harrod – Domar. Menurut Rostow, setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilisasi tabungan domestik dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1993:65).

Mekanisme perekonomian dengan pengertian investasi yang diarahkan kepada usaha mempercepat pertumbuhan ini lebih banyak diterangkan oleh Sir Roy Horrad dan Evsey Domar yang lebih dikenal dengan model pertumbuhan Horrad-Domar. Mereka berpendapat bahwa pertumbuhan pendapatan nasional secara positif berhubungan dengan rasio tabungan dan sebaliknya secara negatif berhubungan dengan COR atau ICOR (*Capital Output Rasio* atau *Incremental capital Output Rasio*). Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: $Y/Y = s/k$, dimana Y/Y adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, s adalah proporsi tabungan terhadap pendapatan nasional dan k adalah COR atau ICOR. COR mengukur berapa tambahan output yang bisa dicapai karena penambahan kapital sebesar satu unit. Sedangkan ICOR adalah untuk mengukur perubahannya (Todaro, 1993: 65-67 dan Sukirno, 1985:120-121). Asumsi yang digunakan disini menunjukkan adanya hubungan antara peningkatan stok kapital dan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output.

Dengan demikian, maka menurut Rostow langkah-langkah untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan hanya soal meningkatkan tabungan nasional dan investasi (Todaro, 1993:67).

Namun demikian, model pertumbuhan Horrad – Domar di atas, tidak terlepas dari kritik. Alasan utama berlakunya teori tersebut bukan karena tabungan dan investasi tidak merupakan suatu syarat keharusan bagi percepatan tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi karena itu saja tidak cukup (Todaro, 1993:68). Meskipun banyak kritik yang dilancarkan, nampaknya strategi pembangunan tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan menghimpun modal, sehingga kelihatannya ada hubungan yang erat antara pembentukan modal dan pertumbuhan ekonomi.

Teori Neo-Klasik, ditinjau dari sudut jumlah faktor yang dianalisisnya, lebih lengkap dari pada teori Horrad – Domar karena disamping membahas mengenai peranan modal, teori ini menunjukkan tentang pentingnya tenaga kerja dan kemajuan teknologi dalam menciptakan suatu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu disuatu daerah atau negara. Dalam sistem ini dianggap bahwa perekonomian tetap mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan dalam keadaan tersebut investasi akan sama besarnya dengan tabungan pada tingkat kesempatan kerja penuh, oleh sebab itu tingkat bunga merupakan alat yang dapat digunakan untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja penuh dari masa ke masa (Sukirno, 1985:124 – 132). Sayang sekali, analisis Neo – Klasik masih belum cukup mendalam pembahasannya terhadap peranan ketiga faktor diatas dalam pembangunan, sehingga belum cukup sempurna bagi landasan dalam

penyusunan strategi pembangunan di negara sedang berkembang. Namun paling tidak analisis Neo-Kalsik telah dapat melengkapi beberapa pendapat diatas.

2.1.2 Perilaku Investasi dan Pendapatan Nasional (PDB)

Teori tentang perilaku investasi mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi stok kapital diinginkan (K^*), serta melihat proses kapital aktual (K) melakukan penyesuaian terhadap stok kapital yang diinginkan. Proses penyesuaian ini dalam teori investasi dikenal sebagai model akselerator.

Konsep atau model akselerator menjelaskan bahwa jumlah stok kapital proposional (sebanding) dengan pendapatan nasional dan ada penyesuaian dari stok kapital aktual menuju stok kapital yang diinginkan. Oleh karena itu, berikut akan diuraikan tentang model akselerator dan model akselerator yang fleksibel (luwes).

a. Model Akselerator

Anggapan dasar yang digunakan dalam model ini adalah : 1) Rasio kapital-output(COR) tetap, 2) stok kapital yang diinginkan (K^*) mempunyai hubungan konstan dengan pendapatan nasional (Q), 3) Stok kapital aktual (K) selalu disesuaikan dengan stok kapital yang diinginkan (lihat misalnya: Wallis, 1980:81 – 85 dan Ott et.al, 1975 : 105 – 110).

Konsep di atas secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$K^* = Q \dots\dots\dots(2.1)$$

$$K_t = K^*_t \dots\dots\dots(2.2)$$

Dan

$$I_t = K_t - K_{t-1} = v(Q_t - Q_{t-1}) \dots\dots\dots(2.3)$$

Dimana; I adalah investasi netto, K adalah stok kapital aktual, Q adalah pendapatan nasional dan $t-1$ adalah periode $t-1$.

Kelemahan dari model ini adalah tidak adanya proses penyesuaian dari stok kapital aktual menuju stok kapital yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa penawaran barang-barang kapital elastisitas tidak terbatas (tidak sesuai dengan kenyataan). Dengan kata lain, anggapan ini menyatakan bahwa setiap barang modal yang diminta akan terpenuhi. Padahal dalam kenyataannya barang-barang kapital persediaannya terbatas.

b. Model Akselerator yang Fleksibel

Model ini pertama kali dikemukakan oleh Koyck (1954) dengan tujuan untuk memperbaiki anggapan model akselerator. Anggapan yang ditambahkan dalam model akselerator yang fleksibel (luwes) adalah adanya proses penyesuaian dari K_t menuju K_t^* (lihat misalnya: Wallis 1980:81, Ott et.al, 1975 :107 dan thomas, 1985:252-253):

$$K_t - K_{t-1} = (1 - \lambda)(K_t^* - K_{t-1}) \quad \dots\dots\dots(2.4)$$

Dimana : $0 < \lambda < 1$

Jadi investasi netto ($K_t - K_{t-1}$) hanya merupakan proporsi tertentu (λ) untuk mencapai stok kapital optimal K_t^* .

Langkah selanjutnya apabila persamaan(2.1) disubstitusikan ke dalam persamaan (2.4) akan didapatkan hasil;

$$K_t - K_{t-1} = \nu\lambda Q_t - \lambda K_{t-1} \quad \dots\dots\dots(2.5)$$

Atau

$$K_t = \nu\lambda Q_t + (1 - \lambda) K_{t-1} \quad \dots\dots\dots(2.5a)$$

Kemudian apabila investasi bruto (I_t) sama dengan investasi netto ditambah investasi pengganti (D_t), maka secara alternatif persediaan modal akhir periode sama dengan persediaan awal periode ditambah investasi bruto dikurangi depresiasi. Dengan menggunakan asumsi bahwa permintaan penggantian atau depresiasi sebanding (proporsional) dengan stok kapital ($D_t = \delta K_{t-1}$), maka akan diperoleh persamaan:

$$GI_t = K_t - K_{t-1} + \delta K_{t-1} \dots\dots\dots (2.6)$$

Apabila persamaan (2.5) disubstitusikan ke dalam persamaan (2.6) akan diperoleh:

$$GI_t - \nu \lambda Q_t + (\delta - \lambda) K_{t-1} \dots\dots\dots (2.7)$$

Selanjutnya dengan transformasi Koyck didapatkan hasil:

$$\begin{aligned} & GI_t - (1 - \delta)GI_{t-1} \\ &= \nu \lambda Q_t - (1 - \delta) \nu \lambda Q_{t-1} + (\delta - \lambda) K_{t-1} - (1 - \delta)(\delta - \lambda)K_{t-2} \\ &= \nu \lambda Q_t - (1 - \delta) \nu \lambda Q_{t-1} + (\delta - \lambda)G_{t-1} \end{aligned}$$

Kemudian akan menjadi:

$$GI_{t-1} = K_{t-1} - (1 - \delta) K_{t-1}$$

Dengan demikian, maka dari persamaan (2.6) akan diperoleh persamaan:

$$GI_t = \nu \lambda Q_t - (1 - \lambda) \nu \lambda Q_{t-1} + (1 - \lambda)G_{t-1} \dots\dots\dots (2.8)$$

Model ini memiliki keunggulan yaitu tidak perlu lagi diukur stok kapital yang datanya sulit didapat. Kelemahannya adalah adanya anggapan bahwa COR konstan, sehingga kemungkinan adanya perubahan harga faktor produksi diabaikan.

2.1.3 Suku Bunga dan Indeks Harga Sebagai Determinan Investasi

Hubungan antara investasi dan suku bunga biasanya dijelaskan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu konsep MEI (*Marginal Efficiency of Investment*) dan biaya modal, COC (*Cost of Capital*). MEC menggambarkan tingkat pendapatan (*rate of return*) dari investas I baru yang diharapkan atau dilakukan. Melalui persamaan:

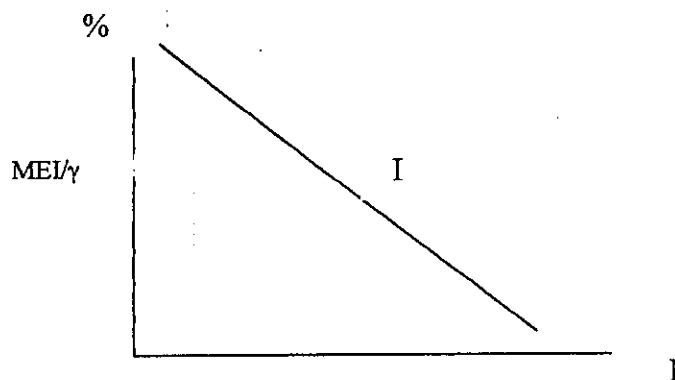
$$C = \frac{R}{(1+r)^n} + \frac{j}{(1+r)^n}$$

Dimana:

- C = Biaya mesin
- r = Tingkat keuntungan (MEI)
- R = Keuntungan kotor
- j = Nilai residu mesin

Dengan diketahuinya nilai C, R dan j maka dapat dihitung besarnya marginal efficiency of invesment (r) Keputusan untuk melakukan investasi tergantung pada besarnya MEI ini dibandingkan dengan tingkat bunga di pasar, maka investasi akan dilakukan. Tetapi sebaliknya, apabila MEI lebih rendah dari pada tingkat bunga pasar investasi tidak akan dilakukan. Dengan demikian dapat diperoleh hubungan antara tingkat bunga dengan pengeluaran investasi (untuk MEI tertentu). Apabila permintaan (pengeluaran) investasi ini dijumlahkan horizontal secara agregat maka akan diperoleh kurva permintaan investasi yang berupa garis lurus turun miring dari kiri atas ke kanan bawah.

GAMBAR 2.1
KURVA PERMINTAAN INVESTASI AGREGAT



Keinginan untuk melakukan investasi juga dipengaruhi oleh pendapatan yang diharapkan dan biaya untuk membiayai investasi. Pendapatan yang diharapkan ditentukan oleh sumbangan ekstra dari setiap penggunaan faktor produksi yang diukur dengan tambahan ekstra hasil produksi dikalikan dengan harganya (sering disebut *value of marginal product*). Penambahan investasi akan berhenti jika nilai produk *marginal* telah sama dengan biaya modal. Dengan demikian jumlah kapital yang diinginkan tergantung dari pada biaya modal serta produk yang diharapkan akan diproduksi. Untuk sesuatu jumlah tertentu output, makin rendah biaya modal akan makin tinggi keinginan melakukan investasi.

Salah satu komponen biaya modal yang utama adalah tingkat bunga. Tingkat bunga ini merupakan biaya alternatif dari penggunaan modal. Apabila modal yang didapat merupakan pinjaman dari bank, maka bunga yang dibayarkan pada bank merupakan biaya penggunaan modal. Tingkat bunga dimaksud tentu saja dalam arti riil, yaitu bunga nominal dikurangi dengan inflasi yang dirumuskan sebagai berikut:

$$* \Gamma_{\text{riil}} = \Gamma_{\text{nom}} - \pi, \text{ dimana } \pi = \text{tingkat inflasi}$$

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah dan implikasinya Terhadap Investasi

Banyak sekali pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam perannya sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, akan tetapi juga untuk mempengaruhi kegiatan perekonomian yang tidak atau kurang dimintai oleh masyarakat atau sektor swasta (Faid Anwar: 1999). Peran pemerintah dalam kegiatan alokasi sumber-sumber ekonomi, distribusi dan stabilisasi juga berakibat serius pada tingkat pengeluarannya.

Pengamatan empiris Adolph Wegner terhadap negara-negara Eropa, Amerika dan Jepang pada abad 19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian makin meningkat. Wegner dalam hal ini menggunakan perbandingan investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional sebagai indikator. Temuannya dinamakan "hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat" (*Law of ever increasing state activity*).

Menurut ekonom Jerman ini, ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi, perkembangan demokrasi dan ketidak-efisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

Hukum Wegner tersebut diuji oleh Peacock dan Wiseman dan ternyata tidak ditolak. Menurut Peacock – Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat yang berimbas pada pengeluaran

pemerintah. Jadi dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional meningkatkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja jadi berkurang.

Menurut Nopirin (1998) apabila pengeluaran investasi swasta tidak cukup mendorong kenaikan GNP (dengan sendirinya juga tidak cukup menciptakan kesempatan kerja), maka pengeluaran pemerintah dapat menggantikannya. Dengan menambahkan pengeluaran pemerintah serta pajak ke dalam model persamaan tidaklah sukar, sehingga pengeluaran sekarang meliputi pengeluaran konsumsi (C), pengeluaran investasi (I) dan pengeluaran pemerintah (G) atau dalam bentuk persamaan $Y = C + I + G$.

Menurut Suparmoko (1994) pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Pengeluaran ini merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang.
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Menurut Rostow dalam Musgrave (1993) pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan tahapan pembangunan ekonomi dibedakan menjadi :

- a. Tahap awal: persentase investasi pemerintah terhadap total investasi

adalah besar, karena pemerintah harus menyediakan prasarana.

- b. Tahap menengah: investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun investasi swasta pada tahap ini juga makin besar.
- c. Tahap lanjutan: peranan pemerintah tetap besar, karena harus menyediakan barang dan jasa publik lebih banyak dan lebih baik. Di lain pihak, peranan sektor swasta makin besar tetapi karena adanya kegagalan pasar, pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengarahkannya.

2.1.5 Hubungan Tenaga Kerja dan Investasi

Menurut Priyono Tjiptohejanto (1997) tenaga kerja adalah sebagian dari keseluruhan penduduk yang secara potensial dapat menghasilkan barang dan jasa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah bagian penduduk yang dapat menghasilkan barang dan jasa, bila ada permintaan akan barang dan jasa tersebut. Tenaga kerja secara umum dapat didefinisikan sebagai jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Dari model yang dikembangkan Lewis "Pembangunan ekonomi dengan persediaan tenaga kerja yang tidak terbatas" (sector tradisional dan modern), dapat dilihat bahwa adanya kelebihan tenaga kerja di sector tradisional cenderung menyebabkan upah rendah dan keuntungan fungsi di sector modern. Dalam hal ini adanya kelebihan tenaga kerja memberikan suatu kesempatan atau intensif bagi

enterprenaur-enterprenaur (wirausahawan) sector modern untuk mencapai keuntungan dan mengembangkan perusahaannya (investasi).

Tenaga kerja yang dipakai dalam sector modern ini hanya terjadi pada tingkat upah sama dengan produktifitas marginal tenaga kerja (MPL) akibatnya keuntungan dapat diperoleh dan sebagian besar keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk pembentukan modal (capital formation).

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi empiris mengenai investasi di daerah dan variabel yang mempengaruhinya pernah dilakukan. Misalnya oleh Aryanti (1991) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menggunakan model analisa regresi dan korelasi diketahui bahwa ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah angkatan kerja, tingkat bunga tertimbang deposito berjangka dan deregulasi perbankan 1 Juni 1983 terhadap investasi baik PMA maupun PMDN. Disimpulkan bahwa, keempat faktor tersebut secara serempak mempengaruhi investasi swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya sarana atau fasilitas transportasi yang lancar diduga kuat sebagai salah satu faktor pendukung.

Penelitian lainnya dilakukannya oleh Elia Radianto (1997) di daerah Maluku dengan menggunakan Model Linier Dinamis (MLD). Hasilnya menunjukkan bahwa nilai investasi swasta di daerah Maluku belum sepenuhnya baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai investasi yang belum mencerminkan semua informasi yang ada. Untuk PDRB dan tingkat suku bunga misalnya tidak

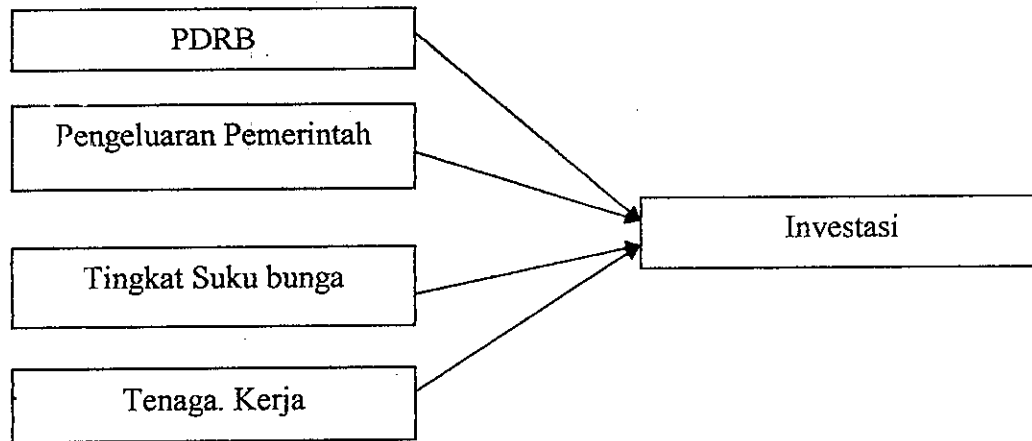
signifikan atau tidak dapat menjelaskan variasi investasi swasta adalah angkatan kerja.

Untuk propinsi Jawa Tengah yang ada di pusat pulau jawa menjadikannya daerah yang cukup potensial untuk dijadikan lahan investasi. Masih sedikitnya investor yang menanamkan modalnya di Jawa Tengah disatu sisi merupakan peluang untuk berinvestasi. Populasi penduduk jawa tengah juga terdapat dijadikan pertimbangan ketika dibutuhkan investasi yang menitik beratkan pada industri padat karya. Kekayaan alam Jawa Tengah disisi lain masih belum banyak digali secara optimal.

2.3 Kerangka Pemikiran

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan investasi di Jawa Tengah termasuk didalamnya faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dalam penelitian ini perhatian ditunjukkan pada faktor ekonomi dengan variabel-variabel antara lain Produk Domestik Regional Bruto, realisasi pengeluaran pemerintah Jawa Tengah, tingkat suku bunga riil dan ketersediaan Tenaga kerja. Berdasarkan hal tersebut dapat dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

GAMBAR 2.2
BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN



2.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. $H_0 : b_i = 0$ Tidak ada pengaruh antara kenaikan PDRB terhadap peningkatan investasi swasta.
 $H_1 : b_i \neq 0$ Ada pengaruh antar kenaikan PDRB terhadap peningkatan investasi swasta.
2. $H_0 : b_i = 0$ Tidak ada pengaruh antara kenaikan pengeluaran pemerintah terhadap peningkatkan investasi swasta.
 $H_1 : b_i \neq 0$ Ada pengaruh antara kenaikan pengeluaran pemerintah terhadap peningkatkan investasi swasta.
3. $H_0 : b_i = 0$ Tidak ada pengaruh antara penurunan tingkat suku bunga terhadap peningkatan investasi swasta.

H1 : $b_i \neq 0$ Ada pengaruh antara penurunan tingkat suku bunga terhadap peningkatan investasi swasta.

4. H0 : $b_i = 0$ Tidak ada pengaruh antara ketersediaan tenaga kerja terhadap investasi swasta.

H1 : $b_i \neq 0$ Ada pengaruh yang positif antara ketersediaan tenaga kerja terhadap investasi swasta.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Investasi Swasta (I1) yang dimaksud adalah penyebaran rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp) ditambah Penanaman Modal Asing (Rp dengan kurs berlaku) yang disetujui pemerintah dengan nilai tertentu di propinsi Jawa Tengah. Investasi merupakan upaya penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada saatnya nanti pemilik modal akan memperoleh hasil dari penanaman modal tersebut (Tandelilin, 1991:3).
2. Tingkat suku bunga (r_1) adalah tingkat rata-rata tertimbang suku bunga pemerintah berupa deposito berjangka 12 bulan dalam persen. Besarnya tingkat suku bunga dalam penelitian ini dari tahun 1979-1984 mengikuti kebijakan pemerintah pusat (Bank Indoensia) dan selanjutnya mengikuti kebijakan Bank Pemerintah didaerah masing-masing.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (t_1) merupakan konsep turunan dari PDRB yang menjelaskan seluruh nilai output yang diproduksi oleh suatu perekonomian regional (daerah) selama periode tertentu, biasanya satu tahun (Insukindro, 1990). PDRB dalam penelitian ini dihitung berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 1993.
4. Pengeluaran pemerintah merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun

dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi, dalam hal ini pengeluaran pemerintah di Jawa Tengah.

5. Tenaga kerja berkaitan dengan jumlah seluruh penduduk usia 10 tahun keatas di propinsi Jawa Tengah, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja, tetapi mau dan mampu bekerja (Swasono, 1988).

3.2 Jenis dan sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain secara berkala (time series) dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan obyek penelitian selama periode tertentu. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari laporan Bank Indonesia (BI) cabang Jawa Tengah, Biro Pusat Statistik (BPS), Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesiasia dan Daerah Jawa Tengah, Laporan Tahunan Bank Indonesia, Departemen Tenaga Kerja serta studi kepustakaan lain yang berkaitan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dari Biro Pusat Statistik Jawa Tengah, bank Indonesia cabang Jawa Tengah, Departemen Tenaga Kerja serta studi kepustakaannya lain yang relevan.

Data utama yang digunakan adalah data penyebaran rencana investasi swasta di daerah Jawa Tengah, data perkembangan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) propinsi Jawa Tengah dan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB), data perkembangan suku bunga deposito yang ditentukan bank pemerintah (SBD) serta data perkembangan tenaga kerja. Data yang digunakan adalah data tahunan periode 1979-1997.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Metode Ordinary Least Square (OLS) dan Partial Adjustment Model (PAM)

Untuk menganalisis data dan menguji hipotesis akan digunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*, dan *Partial Adjustment Model (PAM)*. Dengan menggunakan model OLS diharapkan akan mampu meminimisasi jumlah kuadrat kesalahan terhadap parameter yang diestimasi. Sehingga setelah dipenuhinya beberapa asumsi klasik, penaksir OLS akan memiliki sifat paling efisien (*Best*), linier (*linear*), dan tidak bias (*Unbiased*) atau disingkat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Sedangkan penggunaan PAM sebagai bagian dari model linear dinamis adalah untuk melihat kemungkinan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang diantara variabel-variabel ekonomi. Selain menghindari munculnya regresi langsung (*Spurious Regression*) yang akan menyebabkan keefisien regresi menjadi tidak efisien dan uji baku yang umum dari koefisien regresi menjadi tidak sah. Langkah ini terutama dilakukan jika uji stasionaritas atau bila data tidak stasioner diabaikan.

Digunakannya model linear dinamis (MLD) karena model ini juga mampu menjelaskan tentang fenomena kelambanan yang sering terjadi bagi pelaku ekonomi berdasarkan 3 alasan utama yaitu (Gujarati, 1988: 506-511) :

1. Alasan psikologis. Perilaku seringkali didasarkan atas kelambanan dan kebiasaan. Karena didorong kebiasaan, masyarakat akan merubah kebiasaan konsumsi mereka dengan segera setelah terjadinya penurunan harga atau kenaikan pendapatan. Mungkin karena proses perubahan semacam itu tidak segera dirasakan manfaatnya sehingga perubahan dalam konsumsi merupakan suatu proses yang lambat.
2. Alasan teknis. Keputusan produksi tidak dapat langsung dilaksanakan. Karena penawaran suatu barang tergantung pada proses produksinya. Dibutuhkan waktu mulai dari penggunaan input sampai dengan dihasilkannya output.
3. Alasan kelembagaan. Alasan karena peraturan-peraturan tertentu menyebabkan adanya lag. Misalnya, dana yang ditanamkan dalam tabungan jangka panjang, tiga atau tujuh tahun tidak dapat segera ditarik, walaupun kondisi pasar uang mengindikasikan bahwa lebih menguntungkan bila menanamkan modal tersebut ditempat lain. Sehingga dibutuhkan waktu untuk bereaksi terhadap kejadian-kejadian tersebut.

Berkaitan dengan hal ini maka biasanya para peneliti membentuk dan menaksir suatu model ekonomi yang diharapkan mampu mencerminkan berbagai gerakan atau fenomena yang ada dalam perekonomian, namun juga tidak terlalu kompleks model matematisnya. Dalam kaitan ini spesifikasi dinamis merupakan model alternatif yang penting dalam model dan analisa ekonomi. Secara umum bentuk regresi dengan model OLS adalah :

$$Linvt^* = \alpha_0 + \alpha_1 LPdrbt + \alpha_2 Lapbdt + \alpha_3 Lakt + \alpha_4 LrRiilt + \epsilon_i \dots \dots \dots 1)$$

Dimana :

Invt* : total investasi yang diinginkan / jangka panjang

Pdrbt . pendapatan domestik regional bruto

PPJT : pengeluaran pemerintah Jawa Tengah

Tkt : tenaga kerja

R Riil : tingkat suku bunga deposito

L : logaritma

εI : variabel gangguan

t : waktu pada tahun t ; α = koefisien parameter

Dalam rangka menurunkan model linear dinamis dapat digunakan berbagai pendekatan, seperti autoregresif distributed dan fungsi biaya kuadrat (*quadratic cost function*). Secara umum melalui pendekatan ini dapat diturunkan model dinamik seperti misalnya model penyesuaian parsial, PAM (Insukindro, 1990:40-41).

Masyarakat tidak selalu dapat menanamkan modalnya pada tingkat yang diinginkan. Penyebabnya adalah karena kurangnya pengetahuan, informasi yang kurang lengkap, birokrasi yang terlalu kaku serta hambatan teknologi. Keadaan ini akan menimbulkan konsekwensi dimana masyarakat akan memikul biaya dari kesenjangan antara investasi aktual dengan investasi yang diperoleh yang disebabkan karena adanya kegagalan dalam merealisasikan investasi yang diinginkan dan biaya penyesuaian aktual untuk kembali ke tingkat yang diinginkan.

Dengan mengacu pada model sebelumnya, berdasarkan pertimbangan bahwa perkembangan investasi yang diinginkan tidak bisa diamati secara langsung, maka perlu disusun hipotesis penyesuaian stok/penyesuaian parsial sebagai berikut:

$$\frac{Linv_t}{Linv_{t-1}} = \left(\frac{Linv_t}{Linv_{t-1}} \right)^\delta \quad \dots\dots\dots 0 < \delta \leq 1 \dots\dots\dots 2$$

Persamaan menyatakan suatu persentase konstan dan perbedaan antara perkembangan investasi yang sebenarnya dengan yang diinginkan dihapuskan dalam suatu periode tunggal (tahun). Dalam bentuk lag persamaan tersebut bisa dinyatakan sebagai berikut:

$$Linv_t - Linvt_{t-1} = \delta (Linv_t^* - Linvt_{t-1}) \dots\dots\dots 3$$

Dengan mensubstitusikan $Linv_t^*$ dari (1) persamaan (3) dan menyusunnya kembali, akan diperoleh kembali, akan diperoleh model penyesuaian parsial, PAM sebagai berikut:

$$Linv_t = \alpha_0 + \delta \alpha_1 LPdrbt + \delta \alpha_2 LPpJt + \delta \alpha_3 Lakt + \delta \alpha_4 LrRiilt + \delta D_t + (1-\delta) L inv_{t-1} + \epsilon_i \dots\dots\dots 4)$$

Ciri khas dari model ini adalah, koefisien kelambanan variabel tak bebas $Linv_{t-1}$ terletak pada $0 < \delta < 1$, harus signifikan secara statistik dan tanda koefisien positif. D merupakan variable boneka, dimana $D = 1$ sebelum tahun 1997 dan $D = 0$ setelah tahun 1997, dengan pertimbangan bahwa sesudah tahun 1997 diduga terjadi penurunan investasi karena adanya krisis moneter.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi berganda antar variabel independen. Variabel kolinear mengakibatkan pengaruh pada variabel dependen menjadi sangat mirip dan sangat sulit dipisahkan pengaruh dari individual masing-masing.

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melakukan regresi tambahan (*auxiliary regression*), yaitu dengan melakukan regresi antara variabel bebas yang satu dengan yang lainnya. Dari hasil regresi antara variabel bebas yang satu dengan yang lain kemudian dicari nilai R^2 nya dibandingkan dengan nilai R^2 dari regresi utama. Apabila nilai R^2 dari regresi tambahan lebih besar dari nilai regresi utama maka dapat dipastikan bahwa terdapat gejala multikolinearitas (Gujarati, 1995).

2. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian ada tidaknya gejala heteroskedastisitas memakai uji park (Gujarati, 1995), dengan langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan regresi terhadap model persamaan yang diajukan sehingga diperoleh nilai residual sebagai variabel baru.
- b. Hasil residual yang didapatkan kemudian dikuadratkan dan diubah menjadi bentuk linier. Setelah itu semua variabel bebas yang diajukan

diubah menjadi bentuk log natural. Melakukan regresi dari semua variabel hasil transformasi dari variabel asli.

c. Melakukan identifikasi terhadap nilai t dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka asumsi homokedastisitas diterima
- Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka asumsi homokedastisitas ditolak.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Untuk mendeteksi autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW), namun uji DW ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intersep dalam model regresi dan tidak adanya variabel lag diantara variabel penjelas. Jadi statistik d dari Durbin Watson tidak bisa digunakan untuk mendeteksi serial korelasi dalam model autoregressif. Untuk itu Durbin menyarankan dilakukan uji autokorelasi dengan menggunakan statistik h (Gujarati, 1995). Statistik h mengikuti distribusi normal yang distandardisasikan, yaitu distribusi normal dengan rata-rata nol dan varian satu. Dari distribusi normal dengan derajat kepercayaan 5% diketahui bahwa :

$$\Pr(-1,96 \leq h \leq 1,96) = 0,95$$

Jadi untuk memutuskan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut

(Gujarati, 1995):

- Jika $h > 1,96$ tolak hipotesis nol yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif, dan

- Jika $h < -1,96$ tolak hipotesis nol yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif, tetapi
- Jika h terletak antara $-1,96$ dan $1,96$ hipotesis nol yang menyatakan tidak ada autokorelasi (positif atau negatif) tidak boleh ditolak.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Kondisi Wilayah Jawa Tengah

Jawa Tengah berada pada posisi koordinat yang terletak di antara $108^{\circ} 30'$ sampai $111^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan $5^{\circ} 30'$ sampai $8^{\circ} 30'$ garis Lintang Selatan. Luas wilayah propinsi Jawa Tengah adalah 3.254.000 Ha yang terdiri dari 35 Dati II, yaitu 29 Kabupaten (dengan kota administratif), 6 Kotamadya dan 5.477 desa atau Kelurahan. Adapun batas propinsi wilayah Jawa Tengah adalah :

- Sebelah Barat Propinsi Jawa Barat
- Sebelah Timur Propinsi Jawa Timur
- Sebelah Utara Laut Jawa
- Sebelah Utara Samudera Indonesia

Secara topografis Jawa Tengah dapat digolongkan wilayah dengan ketinggian 0 - 100 m di atas permukaan meliputi 53,3%, wilayah dengan ketinggian antara 100 – 500 m meliputi 27,4%, wilayah dengan ketinggian 500 - 1000 m meliputi 14,7% dan wilayah dengan ketinggian lebih dari 1000 m di atas permukaan laut sebesar 4,60%.

4.2 Investasi di Jawa Tengah

Penanaman modal pada dasarnya banyak berperan dalam kehidupan perekonomian suatu wilayah. Peran penanaman modal seperti penciptaan

kesempatan kerja, peningkatan ekspor non migas dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat menguntungkan suatu wilayah.

Investasi daerah Jawa Tengah ialah keseluruhan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta / (dunia usaha dan masyarakat) di Wilayah Daerah Jawa Tengah dalam tahun tertentu.

Pemerintah Daerah Tk.I Jawa Tengah c.q. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tk.I Jawa Tengah menyusun REPELITA Daerah. Selanjutnya REPELITA Daerah yang disusun oleh BAPPEDA Tk.I menjadi Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah. Salah satu materi dalam REPELITA Daerah tersebut ialah Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah selama REPELITA Daerah. Dalam proyeksi pembiayaan tersebut terdapat faktor-faktor:

- a. Sumber pembiayaan.
- b. Sektor-sektor pembiayaan.
- c. Jumlah alokasi investasi pada masing-masing sektor.

Proyeksi pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber dana investasi, tingkat efisiensi investasi daerah dan laju pertumbuhan ekonomi yang direncanakan atau ditargetkan.

Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir jumlah tenaga kerja lokal yang terserap oleh aktivitas PMA/PMDN adalah sebesar 557.453 orang. Sektor yang banyak menyerap tenaga kerja meliputi sektor industri kecil, industri kayu, industri kimia, farmasi dan pertanian.

4.3 Sumber Dana Investasi

Secara garis besar sumber dana investasi terbagi atas : Sumber dari Pemerintah meliputi dana yang dialokasikan untuk pembangunan atau lazim disebut Anggaran Pembangunan yang terdapat dalam A.PBN, APBD Tk.I dan APBD Tk.II dan Anggaran PenJabatan dan Belanja Desa (APBDES).

Dengan demikian sumber dana investasi dari Pemerintah untuk Pembangunan Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam Satu Tahun Anggaran Tertentu ialah APBN Sektoral baik yang langsung kepada Pemerintah Daerah Tk.I dan Tk.II misalnya Pemerintah Pusat di Daerah (asas Desentralisasi), Anggaran Pembangunan dalam APBD Tk.I dan Tk.II dan Anggaran Pembangunan dalam APBDES. Sumber dana APBDES belum masuk dalam proyeksi pembiayaan pembangunan Sumber Pemerintah tetapi masuk dalam sumber dana masyarakat.

Selanjutnya sumber dana investasi dari swasta dalam REPELITA Daerah dipisahkan atas : PMA / PMDN dan Swasta non Fasilitas. Dengan demikian berdasarkan perincian dalam REPELITA Daerah, sumber utama dana investasi pembangunan daerah terdiri dari Pemerintah, PMDN / PMA dan Swasta non Fasilitas (lihat Tabel IV.2).

4.4 Sektor Pembiayaan

Jumlah sektor dari segi alokasi dana investasi mencapai 22 sektor. Sumber dana investasi tidak melakukan investasi ke semua sektor tersebut. Dana investasi Pembangunan APBN disalurkan ke Daerah Jawa Tengah melalui 19 sektor (lihat Tabel IV.4), sedang dana investasi dari Sumber Pemerintah Daerah Tk.I dan

Tk.II dialokasikan melalui 21 sektor (lihat Tabel 2.2. dan Tabel 2.3. Lampiran 2 dan Lampiran 3). Selanjutnya PMDN dan PMA disalurkan melalui 8 sektor (lihat Tabel IV.4) dan dana Investasi Swasta non Fasilitas dialokasikan melalui 4 (empat) kelompok sektor (lihat Tabel IV.5).

Pengelompokan sektor tidak selalu persis sama baik antara sektor APBN dan APBD Tk.I dan Tk.II maupun dengan sektor Swasta. PMDN dan PMA membagi sektor-sektor investasi kedalam delapan kelompok dimana sektor "bangunan" tidak terdapat dalam sektor APBN dan APBD. Sektor Listrik, Perdagangan dan Jasa-Jasa lainnya yang terdapat dalam PMDN / PMA, sedang dalam APBN / APBD terbagi atas sektor Pertambangan dan Energi termasuk Listrik didalamnya, Sektor Perdagangan tersendiri dan tidak terdapat sektor Jasa-Jasa dalam sistim Sektor APBN / APBD.

Pengelompokan Sektor Investasi PMDN / PMA dan Investasi non Fasilitas kedalam 21 Sektor APBN / APBD dapat dilihat jelas pada Tabel IV.2. Sedang sektor Bangunan dalam sistim sektor PMDN / PMA tidak terdapat padanannya dalam sistim sektor APBN / APBD. Oleh karena itu sektor Bangunan muncul tersendiri dengan nomor urut ke 22.

Gambaran sektor dan pengelompokannya sebagaimana dikemukakan di atas kiranya perlu disinkronkan / diserasikan untuk mempermudah pengembangan sistim jaringan informasi sektor dalam tatanan pembangunan yang menyeluruh dan terpadu. Semua sektor investasi PMDN / PMA dan non Fasilitas pasti dapat terbagi habis kedalam Sektor dan atau Sub Sektor dan atau kedalam Program. Sistim Sektor, Sub Sektor dan Program harus standard untuk Nasional dan untuk

Propinsi dan Kabupaten dan Kotamadia. Sistem yang sama juga berlaku untuk sektor-sektor investasi swasta baik PMDN / PMA maupun Swasta non Fasilitas yang tersebar menyeluruh dan luas di daerah-daerah Tk.II se Indonesia.

Pemberian kredit perbankan sampai pada bank-bank pada lapisan paling bawah yakni bank di pedesaan seperti BPR, harus secara konsekuen menganut sistem Sektor- Sub Sektor dan Program yang telah menjadi standard Nasional tersebut.

4.5 Alokasi Dana Investasi

4.5.1 PELITA V Daerah

Jumlah dana investasi yang berhasil dicapai dalam PELITA V Daerah Jawa Tengah sebesar Rp 43,84 triliun. Prestasi tersebut berhasil / dicapai karena didukung dana dari Sumber Pemerintah sebesar Rp 6,25 triliun atau 14,26 persen, dana dari swasta termasuk PMDN dan PMA Rp 37,59 triliun atau 85,74 persen. Selanjutnya apabila komposisi dana Pemerintah diperinci lebih lanjut maka nampak jelas betapa besar ketergantungan APBD (Pembangunan) terhadap dana dari Pusat.

Selama PELITA V dana yang berasal dari Pemerintah Pusat mencapai 4,38 triliun atau 10,0 persen terhadap total dana investasi, atau 70,13 persen terhadap dana Pemerintah. Dengan demikian dana yang berasal dari Pemerintah Tk.I dan Tk.II se Jawa Tengah hanya 29,83 atau hampir 30 persen yakni sebesar Rp 1,87 triliun atau hanya 4,26 persen dari seluruh dana investasi di Daerah Jawa Tengah. Lebih lanjut dana sumber dari daerah ini diperinci atas Daerah Tk.I

sebesar Rp 0,471 triliun atau Rp 471 milyar atau hanya 1,07 persen terhadap total dana investasi daerah, atau hanya 13,27 persen terhadap total dana Pemerintah.

Sementara dana pembangunan dari sumber Daerah Tk.II se Jawa Tengah sebesar Rp 1,40 triliun atau 3,18 persen terhadap total dana investasi dan atau 22,34 persen terhadap total dana dari Sumber Pemerintah.

Tinjauan selanjutnya ialah dana yang berasal dari Sektor Swasta. Selama PELITA V daerah, dana dari sumber Swasta PMDN dan PMA mencapai hampir Rp 8,1 triliun atau 18,47 persen dari seluruh dana investasi dan hanya 21,55 persen terhadap total dana Swasta. Dengan demikian dana dari Swasta non Fasilitas mencapai hampir Rp 29,5 triliun yakni 67,27 persen terhadap keseluruhan dana Investasi dan 78,45 persen terhadap dana investasi dari Sumber Swasta.

Kenyataan komposisi sumber dana investasi pembangunan daerah yang semakin bergeser ke sumber swasta sebagaimana dipaparkan di atas, kiranya perlu diimbangi dengan perubahan strategi dan kebijaksanaan dan bahkan perubahan persepsi Pemerintah dalam mengelola Pembangunan Daerah. Apabila pada dekade sebelumnya dana swasta hanya bersifat komplementer dalam pengembangan sektor tertentu, dewasa ini keadaan sebaliknya yang terjadi yakni Dana Swasta menjadi kekuatan utama sedang Dana Pemerintah lebih bersifat mendukung.

Pertanyaan mendasar ialah bagaimana dengan porsi dana yang terbatas, Pemerintah semakin meningkatkan iklim kondusif guna merangsang investasi swasta. Perubahan strategi dan kebijaksanaan pembangunan hanya akan menjadi

langkah yang realistis apabila mengacu pada peluang sumber pembiayaan sebagai konsekuensinya.

4.5.2 REPELITA VI Daerah

4.5.2.1 Tinjauan Sumber Investasi dan Perbandingan PELITA V Daerah

Terdapat kesan yang kuat bahwa Pemerintah Daerah Tk.I Jawa Tengah melakukan perubahan strategi pembiayaan yang cukup mendasar dalam REPELITA VI. Dana investasi Pembangunan Daerah dalam REPELITA VI direncanakan sebesar Rp 64,106 triliun atau naik sebesar Rp 20,268 triliun atau naik sebesar 46,23 persen. dibandingkan dengan pembiayaan PELITA V Daerah. Proyeksi ini termasuk "sangat optimis" apalagi jika diperhatikan pada masing-masing sumber dana investasi tersebut.

Rencana dana investasi dari sumber Pemerintah selama REPELITA VI Daerah mencapai Rp 15,64 triliun atau 24,40 persen terhadap total dana investasi yang direncanakan. Nampak adanya kenaikan proporsi dari 14,26 persen selama PELITA V menjadi hampir 25 persen dalam REPELITA VI.

Kenaikan proporsi ini berakibat pada kenaikan dana absolut sebesar Rp 9,39 triliun atau naik 150,26 persen jika dibandingkan dengan PELITA V. Hal ini tentu. membawa konsekuensi strategi dan kebijaksanaan pembiayaan yang sangat mendasar.

Kenaikan dana yang berasal dari Pemerintah tersebut lebih lanjut didukung kenaikan dari Pemerintah Pusat sebesar 141,14 persen, dari Pemda Tk.I Jawa Tengah 164,97 persen dan Pemda Tk.II se Jawa Tengah sebesar hampir 174

persen. Angka-angka kenaikan tersebut sungguh merupakan tantangan karena keadaan keuangan negara dan daerah yang justru cenderung menurun dan strategi pembangunan wilayah yang memberikan perhatian lebih besar kepada KTI.

Selanjutnya rencana investasi dari sumber swasta hanya diproyeksikan naik 28,94 persen yang didukung kenaikan PMDN dan PMA sebesar 44,78 persen dan kenaikan non Fasilitas sebesar hampir 25 persen.

Uraian secara rinci dari apa yang dipaparkan di atas dapat diikuti dalam Tabel 4.1 berikut ini :

TABEL 4.1
INVESTASI PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH PELITA V
(Dalam Milyard Rupiah)

NO	SUMBER	PELITA V		REPELITA VI		SELISIH	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PEMERINTAH	6.250,0	14,26	15.641,0	24,40	9.391,0	150,26
1.	PUSAT	4.383,0	10,00	10.569,0	16,49	6.186,0	141,14
2	DAERAH	1.867,0	4,26	5.070,0	7,91	3.203,0	171,56
2.1	DATI I	471,0	1,07	1.248,0	1,95	777,0	164,97
2.2	DATI II	1.396,0	3,18	3.822,0	5,96	2.426,0	173,78
II	SWASTA	37.588,0	85,74	48.465,0	75,60	10.877,0	28,94
1	PMDN & PMA	8.097,0	18,47	11.723,0	18,29	3.626,0	44,78
2	NON FASILITAS	29.491,0	67,27	36.742,0	57,31	7.251,0	24,59
	JUMLAH	43.838,0	100,00	64.106,0	100,00	20.268,0	46,23

Sumber : BAPPEDA TU Jawa Tengah: REPELITA 11; Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 (diolah kembali)

4.5.2.2 Tinjauan Alokasi Sektoral Dana Investasi Dalam Repelita VI Daerah

a. Keseluruhan Sumber Dana Investasi

Pada dasarnya rencana alokasi dana investasi terbagi habis kedalam sektor-sektor pembangunan. Rencana alokasi dana investasi PMDN dan PMA melalui atau dikelompokkan dalam 8 sektor yakni Sektor Industri, Pertanian

dalam arti luas, Perdagangan, Transportasi, Pertambangan dan Energi, Pariwisata, Perumahan dan Bangunan. Sedang untuk sumber Dana Investasi Swasta non Fasilitas melalui 4 sektor investasi : Industri, Pertanian, Perdagangan dan Pertambangan dan Energi.

Besaran alokasi dana investasi per sektor berdasarkan sumber dana dan jumlah total selama REPELITA VI sebagaimana terlihat dalam Tabel IV.3. Selanjutnya untuk memudahkan pengamatan alokasi dana berdasarkan urutan dari sektor yang mendapat alokasi terbesar sampai dengan sektor yang mendapat alokasi terkecil nomor urut 22 dapat dilihat pada Tabel IV.4. Baik Tabel IV.3 maupun Tabel IV.4 merupakan ringkasan dari Tabel IV.... terlampir (Lampiran 1). Dengan demikian Tabel IV.3. dan Tabel IV.4 berdasarkan urutan besar - kecilnya alokasi dana investasi.

Dari Tabel IV.3 terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) sektor utama yang menyerap 72,42 persen dana investasi. Ketiga sektor tersebut didukung PMDN / PMA dan Investasi non Fasilitas sebesar 98 persen dan dana Pemerintah hanya 2 persen. Terdapat dua sektor yakni : Perumahan, Pemukiman dan Perkantoran dan Sektor Pariwisata, Telkom dan Hotel yang juga dominan dibiayai Swasta (PMDN / PMA). Suatu hal yang menarik ialah tidak nampaknya alokasi dana Investasi non Fasilitas pada sektor-sektor yang sesungguhnya akhir-akhir ini semakin menonjol misalnya sektor Transportasi, sektor Pendidikan, sektor Perumahan dan sektor Kesehatan.

Barangkali disini letaknya kelemahan birokrasi dalam mengembangkan jaringan data / informasi Investasi, sementara disisi lain perangkat Pemerintah hadir

sampai ke lapisan masyarakat paling bawah "pedesaan". Kalau saja jaringan data / informasi tersebut dapat dikembangkan dan berfungsi secara penuh maka data untuk kepentingan perencanaan sektoral dapat dengan mudah diperoleh dan lebih memiliki akurasi.

Perencanaan pembiayaan sektoral harus menjadi satu kesatuan dari semua sumber pembiayaan. Strategi pembiayaan pembangunan sektoral hanya dapat dilakukan dengan baik apabila diketahui prospek pembiayaan dari masing-masing sumber pada masing-masing sektor.

Kaidah dasar pembiayaan ialah efisiensi dan rasional serta secara sadar menuju pencapaian sasaran atau tujuan. Dengan demikian pembiayaan dari sektor pemerintah lebih berperan sebagai penciptaan iklim yang memungkinkan swasta melakukan investasi pada sektor tertentu.

Dengan demikian agenda REPELITA bukan hanya menyangkut agenda kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah saja, tetapi meliputi semua sumber pembiayaan. Dalam hubungan ini perlu adanya perubahan persepsi birokrasi Pemerintah dan dalam perubahan tersebut harus secara tepat menempatkan diri sebagai:

- a. Entrepreneur, untuk memungkinkan perkembangan lebih lanjut dan sekaligus memahami budaya dunia usaha.
- b. Service Provider, yakni penyedia jasa pelayanan yang memungkinkan masyarakat / dunia usaha swasta dapat lebih berkembang.

- c. Enabler, yakni peranan Pemerintah yang membuka "kemungkinan" bagi dunia usaha swasta / masyarakat meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan.

Menasuki era globalisasi hubungan ekonomi antar negara, kiranya perubahan persepsi dan penggeseran peran Pemerintah menjadi semakin mendesak. Peranan pembiayaan dari sumber swasta harus semakin besar dan pemerintah membuka peluang agar sektor swasta dapat bekerja secara efisien.

Selanjutnya dari prospek peningkatan investasi per sektorpun menunjukkan adanya variasi yang demikian besar. Secara keseluruhan prospek investasi diperkirakan akan tumbuh hampir 10 persen per tahun. Sektor industri yang menjadi andalan dalam struktur ekonomi justru hanya tumbuh rata-rata hampir 7 persen per tahun. Pertumbuhan investasi industri tersebut kiranya tidak cukup kuat untuk menopang perubahan struktur ekonomi khususnya menopang sektor ekspor. Hampir sama dengan laju pertumbuhan investasi sektor industri, laju pertumbuhan investasi sektor pertanian hanya diperkirakan hampir 8 persen (7,92 %) per tahun. Sektor-sektor lain yang juga berada di bawah angka laju pertumbuhan investasi rata-rata di daerah ialah Sektor Pertambangan dan Energi 5,70 persen, Sumber daya Air dan Irigasi 5,45 persen, Perumahan, Pemukiman dan Perkantoran 7,77 persen. Sedang sektor Pariwisata, Telkom dan Hotel bahkan mengalami pertumbuhan Investasi negatif rata-rata 4,27 perser. per tahun. Tentu hal itu tidak sesuai dengan kecenderungan umum dimana Sektor Pariwisata, Telkom dan Hotel justru akan terus meningkat dimasa yang akan datang.

Tambahan pula Jawa Tengah merupakan Daerah Tujuan Wisata, domestik maupun mancanegara.

Disisi lain nampak sektor-sektor yang hanya dibiayai dari dana investasi Pemerintah mengalami laju pertumbuhan yang demikian tinggi yakni di atas laju pertumbuhan rata-rata. Optimisme dana investasi sumber Pemerintah dalam REPELITA VI ini sesungguhnya masih merupakan masalah mengingat sumber dana investasi terbesar berasal dari Pemerintah Pusat yang dalam REPELITA VI memprioritaskan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, disamping juga adanya keterbatasan dana Pemerintah itu sendiri. Hapusnya sejumlah obyek penerimaan daerah juga merupakan Catatan Tersendiri dalam proyeksi yang optimis tersebut.

TABEL 4.2
INVESTASI DARI SEMUA SUMBER DI JAWA TENGAH SELAMA
REPELITA VI
(DALAM MILYAR RP)

GABUNG-2

NO	NO SEKT	SEKTOR	PEME RINT	PMDN/ PMA	SWAS TA	JUML	%	r %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Industri	69	7,370	15,062	22,50	35.10	6.88
2	2	Pertanian& Kehutanan	478	1,286	7,328	9,092	14.18	7.92
3	3	Sumberdaya air& Irigasi	2,139	0	0	2,139	3.34	5.45
4	4	Tenaga Kerja	148	0	0	148	0.23	14.90
5	5	Perdag. PDU, UD, KU, Kop.	387	385	14,061	14,83	23.14	13.69
		Listrikan&jasa-jasa lainnya	0	0	0	0	0.00	
6	6	Transportasi	3,774	630	0	4,404	6.87	14.34
7	7	Pertambangan Energi	2,040	44	292	2,376	3.71	5.70
8	8	Pariwisata Jelkom & Hotel	97 240	955	0	1,052	1.64	(4.27)
9	9	Bangda & Pem. Kembali		0	0	240	0.37	17.56
10	10	Lingkungan Hidup & TR	136	0	0	136	0.21	22.89
11	11	Dikbudnas, dll	2,459	0	0	2,459	3.84	11.64
12	12	Pendidikan & Kel. Sej.	231	0	0	231	0.35	19.89
13	13	Kesehatan & Kesos dll	759	0	0	759	1.18	12.87
14	14	Perumahan, Permukiman dan Perkantoran	485	946	0	1,431	2.23	7.77
			0	0	0	0	0.00	
15	15	Agama	140	0	0	140	0.22	12.92
16	16	Iptek	172	0	0	172	0.27	27.38
17	17	Hukum	77	0	0	77	0.12	15.20
18	18	Apem & Pengawasan	963	0	0	963	1.50	12.03
19	19	Pol, Pen dll	105	0	0	105	0.16	16.62
20	20	Trantibun	20	0	0	20	0.03	28.27
21	21	Bantuan Daerah Bawahan	722	0	0	722	1.13	18.86
22	22	Bangunan	0	107	0	107	0.17	17.55
		J u m l a h	15,641	11,723	36,742	64,10	100.0	9.47

Sumber: BAPPEDA Tk I Jawa Tengah, REPELITA VI, Buku I Tabel 5.3 (diolah kembali)

TABEL 4.3
INVESTASI DARI SEMUA SUMBER DI JAWA TENGAH SELAMA
REPELITA VI
(DALAM MILYAR RP)

GABUNG-3

N0	N0 SEKT.	SEKTOR	PEMER INT.	PMDN/ PMA	SWASTA	JUMLAH	%	r %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Industri	69	7,370	15,062	22,500	35.10	6.88
2	5	Perdag. PDU, UD, KU, Kop. Listrikdanjasa-jasa lainnya	387	385	14,061	14,832	23.14	13.69
3	2	Pertanian & Kehutanan /	478	1,286	7,328	9,092	14.18	7.92
4	6	Transportasi	3,774	630	0	4,404	6.87	14.34
5	11	Dikbudnas, dll	2,459	0	0	2,459	3.84	11.64
6	7	Pertambangan Energi	2,040	44	292	2,376	3.71	5.70
7	3	Sumberdaya air & Irigasi	2,139	0	0	2,139	3.34	5.45
8	14	Perumahan, Permukiman dan Perkantoran	485	946	0	1,431	2.23	7.77
9	8	Pariwisata, Telkom & Hotel /	97	955	0	1,052	1.64	(4.27)
10	18	Apem & Pengawasan	963	0	0	963	1.50	12.03
11	13	Kesehatan & Kesos dll	759	0	0	759	1.18	12.87
12	21	Bantuan Daerah Bawahan	722	0	0	722	1.13	18.86
13	9	Bangda & Pem. Kembali	240	0	0	240	0.37	17.56
14	12	Pendidikan & Kel. Sej.	231	0	0	231	0.36	19.89
15	16	Iptek	172	0	0	172	0.27	27.38
16	4	Tenaga Kerja	148	0	0	148	0.23	14.90
17	15	Agama	140	0	0	140	0.22	12.92
18	10	Lingkungan Hidup & TR	136	0	0	136	0.21	22.89
19	22	Bangunan	0	107	0	107	0.17	17.55
20	19	Pol, Pen dll	105	0	0	105	0.16	16.62
21	17	Hukum	77	0	0	77	0.12	15.20
22	20	Trantibun	20	0	0	20	0.03	28.27
Jumlah			15,641	11,723	36,742	64,106	100.0	9.47

Sumber: BAPPEDA Tk I Jawa Tengah; REPELITA VI, Buku I Tabel 5.3 (diolah kembali)

Keterangan: Sektor-sektor diurut berdasarkan jumlah investasi kolom 7.

b. Sumber Dana Investasi Pemerintah

Tabel 4.5. berikut secara lengkap menggambarkan Rencana Alokasi Dana dari sumber anggaran Pemerintah yang terdiri dari APBN, APBD Tk.I dan Tk.II. Terdapat empat sektor yang menyerap 66,58 persen anggaran Pemerintah masing-masing : Sektor Transportasi 24,13 persen, Sektor Dikbudnas sebesar 15,72 persen, Sektor Sumberdaya Air dan Irigasi sebesar 13,68 persen dan Pertambangan dan Energi sebesar 13,08 persen. Dengan demikian untuk 17 sektor pembangunan lainnya hanya tersedia 33,42 persen yang berkisar antara 0,13 persen untuk Sektor Trantibun dan 6,15 persen untuk Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.

Pola rencana alokasi dana Pemerintah sebagaimana terlihat pada tabel tersebut tidak menunjukkan adanya perubahan dari tahun ke tahun dalam REPELITA VI. Dengan kata lain tidak terjadi penggeseran prioritas pembiayaan Pemerintah selama REPELITA VI Daerah.

Dari segi laju pertumbuhan dana investasi Pemerintah, diperkirakan mencapai rata-rata 15,43 persen pertahun. Hanya ada empat sektor yang laju pertumbuhan alokasi anggarannya di bawah rata-rata yakni sektor Sumberdaya Air dan Irigasi hanya bertumbuh 5,86 persen, Sektor Pertambangan dan Energi bertumbuh dengan 11,35 persen Sektor Dikbudnas sebesar 14,76 persen dan terakhir Sektor Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan sebesar 15,26 persen atau hampir sama dengan Angka Rata-Rata Pertumbuhan Total Anggaran Perrierintah. Patut dicatat bahwa laju pertumbuhan dana investasi yang bersumber dari Pemerintah sebesar 15,43 persen tersebut dimungkinkan karena dukungan

pertumbuhan dana dari APBN sebesar 11,73 persen, dukungan pertumbuhan dana dari APBD Tk.I dan APBD Tk.II masing-masing sebesar 24,67 persen.

TABEL 4.4
PENANAMAN MODAL DALAM NEGEPI (PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DALAM
REPELITA DAERAH JAWA TENGAH
(Dalam Miliar Rp)

No	SEKTOR	94/95	%	95/96	%	96/97	%	97/98	%	98/99	%	JUMLAH	PROPORSI	r (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pertanian,kehutanan Dan Perikanan	170,4	8,0	130,3	6,0	160,3	6,9	211,0	8,5	270,1	10,2	1,020,8	8,7	9,65
1.1	Pertanian	9,3	0,4	13,4	0,6	5,9	0,3	120,5	4,9	56,6	2,1	212,4	1,8	43,63
1.2	Perikanan	16,0	0,8	39,3	1,8	15,1	0,7	12,1	0,5	55,9	2,1	138,9	1,2	28,39
1.3	Kehutanan													
	JUMLAH	195,7	9,2	183,0	8,5	181,3	7,8	343,6	13,9	382,6	14,5	1,372,2	11,7	14,35
2	Pertambangan	9,4	0,4	17,4	0,8	4,1	0,2	5,2	0,2	7,8	0,3	38,9	0,3	(3,82)
3	Industri	442,0	20,8	245,4	11,4	455,2	19,7	249,7	10,1	341,9	12,9	1,698,5	14,5	(5,01)
3.1	Kimia dan Farmasi	188,9	8,9	187,5	8,7	207,4	9,0	256,2	10,4	271,9	10,3	1,416,6	12,1	7,56
3.2	Tekstil	210,0	9,9	253,5	11,7	316,5	13,7	396,8	16,0	344,4	13,0	1,389,6	11,9	10,40
3.3	Mineral Nonlogam	352,6	16,6	396,3	18,3	129,5	5,6	174,1	7,0	228,6	8,6	1,371,3	11,7	(8,30)
3.4	Kertas	69,5	3,3	104,7	4,8	121,5	5,3	187,8	7,6	195,5	7,4	618,0	5,3	22,99
3.5	Makanan	81,1	3,8	48,7	2,3	80,5	3,5	54,4	2,2	76,2	2,9	362,8	3,1	(1,26)
3.6	Kayu	40,6	1,9	66,6	3,1	85,6	3,7	82,8	3,3	88,6	3,3	348,0	3,0	16,26
3.7	Barang Logam	44,5	2,1	97,3	4,5	10,9	0,5	77,3	3,1	90,2	3,4	299,3	2,6	15,19
3.8	Logam Dasar	2,1	0,1	5,2	0,2	1,4	0,1	3,1	0,1	5,1	0,2	20,9	0,2	19,62
3.9	Lainnya													
	JUMLAH	1,431,4	67,2	1,405,2	65,0	1,408,5	60,9	1,482,1	59,9	1,642,4	62,0	7,525,2	64,2	2,79
4	Perhotelan	201,8	9,5	229,4	10,6	178,8	7,7	201,6	8,1	143,7	5,4	927,2	7,9	(6,57)
5	Perumahan dan	181,5	8,5	128,6	6,0	257,5	11,1	176,6	7,1	202,2	7,6	845,3	7,2	2,19
6	Perkantoran	47,0	2,2	63,3	2,9	224,3	9,7	144,9	5,9	150,3	5,7	597,8	5,1	26,19
7	Pengangkutan	47,4	2,2	118,2	5,5	46,8	2,0	86,2	3,5	85,9	3,2	321,7	2,7	12,60
8	Listrik, Perdagangan,													
9	dan Jasa-Jasa lainnya	14,3	0,7	15,9	0,7	10,9	0,5	33,9	1,4	32,1	1,2	94,8	0,8	17,64
10	Bangunan													
	JUMLAH	2,128,5	100,0	2,161,1	100,0	2,312,2	100,0	2,474,2	100,0	2,647,0	100,0	11,723,0	100,0	4,46
		18,2		18,4		19,7		21,1		22,6		100,0		

BAPPEDA TKI Jawa Tengah: REPELITA VI DAERAH (diolah kembali)

Rencana alokasi dana APBD Tk.II persektor diasumsikan sama dengan proporsi alokasi persektor untuk APBD Tk.I. Hal ini semata-mata untuk menutupi kekurangan data karena data alokasi APBD Tk.II per sektor tidak tersedia.

Dengan demikian paparan tentang Dana Investasi Sumber Pemerintah dan Alokasi Sektor kiranya dapat memberikan informasi yang berguna terutama untuk kepentingan evaluasi.

c. Sumber Dana Investasi PMDN dan PMA

Alokasi dana investasi PMDN dan PMA persektor menggunakan pendekatan empiris. Hal ini semata-mata karena Data Rencana PMDN - PMA dalam REPELITA VI tidak terperinci dalam sektor. Terdapat beberapa tahap dalam proses alokasi PMDN dan PMA tersebut. Pertama menghitung proporsi PMDN dan PMA pertahun selama PELITA V. Selanjutnya berdasarkan proporsi tersebut menentukan besaran alokasi PMDN / PMA per tahun dalam REPELITA VI yang jumlah totalnya telah direncanakan sebesar Rp 11,723 triliun. Berdasarkan pendekatan ini maka nampak proporsi dan besaran alokasi selama REPELITA VI sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.4 Proporsi PMDN / PMA tahun 1994 / 1995 sebesar 18,2 persen dan terus meningkat menjadi 22,6 persen pada tahun terakhir REPELITA VI. Berdasarkan proporsi tersebut maka alokasi PMDN dan PMA tahun 1994 / 1995 mencapai Rp 2,647 triliun pada tahun 1998 / 1999.

PMDN dan PMA dengan porsi terbesar adalah sektor Industri Pengolahan 64,2 persen diikuti Sektor Pertanian (dalam arti luas) sebesar 11,7 persen. Sedang 6 sektor lainnya berkisar antara 0,3 sampai 7,9 persen. Nampak bahwa investasi dalam bidang industri tetap merupakan unggulan. Terdapat 4 (empat) industri pengolahan yang dominan menguasai 50,2 persen PMDN - PMA. Industri Kimia dan Farmasi

menduduki porsi tertinggi 14,5 persen, diikuti Industri tekstil 12,1 persen, Industri Mineral non Logam 11,9 persen dan Industri kertas 11,7 persen.

Industri pengolahan lainnya menguasai 14 persen. PMDN dan PMA di sektor pertanian yang tertinggi adalah di sektor Pertanian menyusul Perikanan dan Kehutanan masing-masing 8,7 persen, 1,8 persen dan 1,2 persen. Investasi PMDN dan PMA di sektor Perhotelan 7,9 persen, Sektor Perumahan dan Perkantoran 7,2 persen, Sektor Pengangkutan 5,1 persen, Sektor Listrik Perdagangan dan Jasa-jasa lainnya 2,7 persen, Sektor Bangunan 0,8 persen dan yang terkecil Sektor Pertambangan 0,3 persen.

Dari segi pertumbuhan investasi, nampak bahwa Sumber PMDN dan PMA tidak secerah sumber dana investasi lainnya. Secara keseluruhan hanya akan tumbuh di bawah 5 persen (4,46 persen). Ini tentu bukan suatu yang menggembirakan bagi Jawa Tengah yang justru sangat membutuhkan arus dana masuk yang cukup besar guna peningkatan ekonominya yang relatif tertinggal jika dibandingkan dengan tiga Propinsi besar lainnya di Jawa. Prospek investasi PMDN / PMA di sektor Pertanian khususnya Perikanan dan Kehutanan cukup menggembirakan yakni bertumbuh rata-rata 43,63 persen dan 28,39 persen. Sedang secara keseluruhan pertumbuhan PMDN / PMA di sektor Pengangkutan merupakan yang tertinggi yakni 26,19 persen diikuti sektor Bangunan 17,64 persen, Sektor Pertanian 14,35 persen, Sektor Listrik, Perdagangan dan Jasa-jasa lainnya 12,60 persen, Sektor Industri Pengolahan hanya 2,79 persen. Pertumbuhan negatif terjadi pada sektor Perhotelan yakni rata-rata turun 6,57 persen per tahun.

Profil PMDN dan PMA sebagaimana dikemukakan di atas kiranya menjadi alasan kuat untuk meningkatkan upaya untuk mencari dana investasi melalui serangkaian kebijaksanaan khusus. Kebijakan khusus tersebut sudah tentu

melebihi daya tarik yang sekarang ada, bahkan harus mengungguli daya tarik di propinsi lainnya.

Upaya melalui promosi saja sudah tentu belum memadai. Justru yang lebih penting lagi ialah menyingkirkan hambatan-hambatan yang banyak menjadi keluhan investor atau calon investor. Gambaran secara terperinci tentang investasi PMDN dan PMA, dapat diikuti dalam Tabel 4.4

d. Sumber Dana Investasi Swasta Non Fasilitas

Tabel 4.5 Tentang Rencana Investasi Swasta dalam REPELITA VI juga merupakan olahan dari data yang belum terperinci kedalam sektor. Dalam REPELITA VI Daerah hanya dikemukakan dana Investasi non Fasilitas selama REPELITA VI Daerah sebesar Rp 36,742 triliun. Pendekatan yang digunakan untuk mengalokasikan dana non fasilitas tersebut kedalam sektor-sektor ialah Pendekatan Indikatip. Dengan meminjam pengelompokan Sektor dan proporsi kredit perbankan, selanjutnya dana investasi non fasilitas tersebut dialokasikan kedalam empat sektor. Keempat sektor tersebut ialah : Pertanian, Pertambangan, Industri dan Perdagangan dan Jasa-jasa lainnya.

Berdasarkan pendekatan indikatip tersebut maka jumlah alokasi dana investasi non fasilitas untuk sektor industri merupakan yang teratas yakni sebesar 41,0 persen dengan laju pertumbuhan rata-rata hanya 9,04 persen. Sektor terbesar kedua ialah Perdagangan dan Jasa-Jasa lainnya sebesar 38,3 persen dengan laju pertumbuhan tertinggi yakni 13,57 persen. Nampak bahwa Sektor Perdagangan dan Jasa akan tetap menjadi lahan investasi yang menarik. Sektor pertanian menduduki urutan ketiga dengan jumlah 19,9 persen. Pertumbuhan investasi sektor ini hanya 6,23 persen. Sektor terakhir ialah Pertambangan hanya menguasai Investasi non Fasilitas sebesar

0,8 persen dengan laju pertumbuhan negatif yakni hampir 14 persen per tahun. Angka-angka secara terperinci per tahun dan total dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut. Patut dicatat bahwa sumbangan dari Swasta non Fasilitas dalam pembentukan modal di Jawa Tengah demikian dominan yakni 57,31 persen. Tantangan untuk dapat mewujudkan rencana dana swasta non fasilitas tersebut ialah terciptanya iklim usaha yang semakin kondusif. Terasuk dalam hal ini ialah Peluang pasar baik domestik maupun pasar ekspor.

TABEL 4.5
INVESTASI SWASTA NON FASILITAS DI JAWA TENGAH DALAM
REPELITA VI DAERAH JAWA TENGAH
(Dalam Miliar Rp)

N0	SEKTOR	94/95	%	95/96	%	96/97	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Industri	2.326.6	40,9	2.765.9	43,8	2.928.8	40,7
2	Perdagangan dan Jasa-Jasa Lainnya	2.076.1	36,5	2.206.5	34,9	2.748.5	38,2
3	Pertanian	1.209.5	21,2	1.264.9	20,0	1.471.9	20,4
4	Pertambangan	82.8	1,5	82.4	1,3	52.3	0,7
	JUMLAH	5.695.0	100,0	6.319.6	100,0	7.201.4	100,0
	%	15,5		17,2		19,6	

N0	SEKTOR	97/98	%	98/99	%	JML	PRO - PORSI (%)	r (%)
1	2	9	10	11	12	13	14	15
1	Industri	3.453.2	41.4	3.587.1	39,1	15.061.5	41,0	9,04
2	Perdagangan Jasa2 Lainnya	3.107.1	37.7	3.922.5	42,7	14.060.7	38,3	13,57
3	Pertanian	1.745.5	20,9	1.636.2	17,8	7.328.0	19,9	6,23
4	Pertambangan	34.7	0,4	39.7	0,4	291.7	0,8	(13.69)
	JUMLAH	8.340.4	100,0	9.185.5	100,0	36.742.0	100,0	10,03
	%/fs	22,7		25,0		100,0		

Sumber: BAPPEDA TU Jawa Tengah; KEPELITA VI Daerah (diolah kembali)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Estimasi *Partial Adjustment Model* (PAM) Tingkat Investasi di Propinsi Jawa Tengah

Hasil estimasi dengan menggunakan model linear dinamis penyesuaian parsial atau *Partial Adjustment Model* (PAM) terhadap investasi di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5.1
HASIL ESTIMASI

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	8.486	1.218		7.581	.001
ln PDRBt	.618	.083	.365	24.807	.000
ln PPJT	2.263	.048	.806	49.438	.000
ln Tkt	.628	.063	.057	6.523	.000
ln RRILt	-1.634	.033	-.321	-41.362	.000
ln INVt-1	4E-01	.015	.038	2.489	.023
D	.001	.000	.001	.001	.000

a. Dependent Variabel: ln RRILt

Hasil estimasi dengan menggunakan model linear dinamis penyesuaian parsial atau *Partial Adjustment Model* (PAM) dapat dijabarkan dalam persamaan sebagai berikut :

$$\ln \text{INV}_t = 8,486 + 0,618 \ln \text{PDRB}_t + 2,263 \ln \text{PPJT} + 0,628 \ln \text{Tkt} - 1,634 \ln \text{RRIL}_t + 0,4 \ln \text{INVT}_{t-1} + 0.01 \text{ D}$$

Keterangan :

INV	=	Investasi
PDRB	=	Pendapatan Domestik Regional Bruto
PPJT	=	Pengeluaran Pemerintah
Tk	=	Tenaga Kerja
R RIIL	=	Tingkat Suku Bunga Deposito
F_{hitung}	=	4209,646
DW_{test}	=	2,416
R^2	=	0,899
D	=	Dummy Variabel

Besarnya koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,899 atau 89,9 persen ini dapat diartikan bahwa 89,9 persen variasi variabel tidak bebas dapat diterangkan oleh variabel bebas dalam model, sedangkan sisanya (10.1 persen) dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar model. Dari persamaan di atas hasil yang dapat diterangkan sebagai berikut :

1. $\delta_0 = 8,486$

Konstanta sebesar 8,486 dapat diartikan jika variabel PDRB, APBD, Angkatan Kerja dan Tingkat Suku Bunga diasumsikan sama dengan 0 secara rata-rata variabel diluar model memberikan nilai pada kebutuhan dana sebesar 8,486.

2. $\text{LnPDRB} = 0,618$

Koefisien regresi besaran koefisien LnPDRBt sebesar 0,618 dan bertanda positif berarti memberi pengaruh positif, sehingga dalam hal ini δ_1 bertanda positif. Dengan demikian variabel LnPDRBt berpengaruh positif terhadap LnINVt . Hal ini dapat dimaknai bahwa jika Pendapatan Domestik Regional Bruto

meningkat 1 persen maka tingkat Investasi akan meningkat sebesar 0,618 persen.

3. $\text{LnPPJT} = 2,263$

Besaran yang tertera pada koefisien LnPPJT sebesar 2,2263 dapat diinterpretasikan sebagai berikut : δ_2 bertanda positif berarti, variabel LnAPBDt memberi pengaruh positif terhadap LnINVt. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika pengeluaran pemerintah naik 1 persen maka tingkat investasi akan meningkat sebesar 2,263 persen.

4. $\text{LnTk} = 0,628$

Besaran yang tertera pada koefisien LnTKt sebesar 0,628 dapat diinterpretasikan δ_3 bertanda positif berarti, variabel LnAKt memberi pengaruh positif terhadap LnINVt. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika Angkatan Kerja meningkat 1 persen maka tingkat investasi akan meningkat sebesar 0,628 persen.

5. $\text{LnRRIL} = - 1,634$

Sedangkan pada besaran yang tertera pada koefisien LnRRILt sebesar $- 1,634$ dapat diinterpretasikan δ_4 bertanda negatif. Hal ini berarti, variabel LnRRILt memberi pengaruh positif terhadap LnINVt. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika tingkat suku bunga deposito meningkat 1 persen maka tingkat investasi akan menurun sebesar 1,634 persen.

6. $\text{LnINVt-1} = 0,4$

Besaran yang tertera pada koefisien LnINVt-1 sebesar 0,4 dapat diinterpretasikan δ_5 bertanda positif berarti, variabel LnINVt-1 memberi pengaruh positif terhadap LnINVt. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika tingkat investasi satu tahun yang lalu

meningkat 1 persen maka tingkat investasi akan meningkat sebesar 0,4 persen.

7. $D = 0.01$

Dalam persamaan jangka pendek maupun jangka panjang tidak terjadi perubahan konstanta. Sejak terjadinya krisis moneter (konstanta bernilai tetap) yaitu untuk jangka pendek 8.486 sedangkan untuk jangka panjang 14.143.

Pada periode sebelum krisis moneter konstanta pada persamaan jangka pendek maupun jangka panjang nilainya lebih tinggi dengan kelebihan sebesar 0.01 dimana konstanta jangka pendek sebesar 8.496 dan jangka panjang 14.153

Hal ini juga menunjukkan bahwa pendekatan model dinamik Partial Adjustment Model (PAM) yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat (kriteria) yang ditentukan yaitu nilai kelambanan dari variabel terikat ($\ln INV_t - 1$) terletak diantara nol dan satu ($0 < \ln INV_t - 1 < 1$)

Sedangkan pada variabel Pendapatan Daerah Regional Bruto dan Tingkat tenaga Kerja menunjukkan bahwa mempunyai besaran koefisien elastisitas cukup baik, karena lebih besar dari 1 (Gujarati, 1995).

4.2.1 Pengujian Secara Parsial

Penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda (*multiply regression analysis*) dengan bantuan program *SPSS 10.0*, dengan memperhatikan nilai t_{hitung} dari hasil regresi tersebut untuk mengetahui signifikansi variabel independen secara terpisah (parsial) terhadap variabel dependen pada tingkat alfa = 5 %. Dengan syarat apabila variabel independen signifikan terhadap variabel dependen maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sedangkan apabila

tidak signifikan maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian koefisien regresi parsial atau uji t digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak dengan mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Penentuan t-tabel menggunakan ketentuan tingkat signifikansi 5 persen (0,05 : 2) dengan $df = n - k$ didapatkan nilai t-tabel : 1,729 sedangkan t-hitung dari hasil output komputer melalui program *SPSS 10.0* disajikan dalam Tabel 5.2 di bawah ini :

TABEL 5.2
NILAI t_{hitung}

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}
LnPDRBt	24,807	1,729
LnPPJT	49,438	1,729
LnTKt	6,523	1,729
LnRRIILt	- 41,362	-1,729
Ln INVt-1	2,489	1,729

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2004

Melihat nilai t_{hitung} yang kemudian diperbandingkan dengan nilai t tabel, maka dapat dikatakan bahwa secara parsial masing-masing variabel bebas memang berpengaruh nyata (*significant*) pada tingkat alfa 5 persen. Secara rinci, maka pengujian secara parsial berdasarkan perhitungan uji-t untuk persamaan diuraikan sebagai berikut :

Dengan melihat pada tabel 5.2 di atas diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto lebih besar daripada t_{tabel} ($24,807 > 1,729$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat investasi.

Dengan melihat pada nilai t_{hitung} variable pengeluaran pemerintah lebih besar daripada t_{tabel} ($49,438 > 1,729$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat investasi.

Nilai t_{hitung} variabel Tenaga Kerja lebih besar daripada t_{tabel} ($6,523 > 1,729$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Tingkat investasi.

Sedangkan pada nilai t_{hitung} variabel tingkat suku bunga deposito lebih besar daripada t_{tabel} ($-41,362 < -1,729$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tingkat suku bunga deposito berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kebutuhan dana.

Nilai t_{hitung} variabel tingkat suku bunga satu tahun yang lalu lebih besar daripada t_{tabel} ($2,489 > 1,729$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tingkat investasi satu tahun yang lalu berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat investasi.

Dengan demikian ketentuan penggunaan *Partial Adjustment Models* (PAM) pada model penelitian ini dapat terpenuhi. Dengan kata lain model *Partial Adjustment Models* (PAM) diatas berhasil dalam mengestimasi tingkat investasi Propinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa model PAM cocok digunakan untuk mengestimasi pengaruh variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, tenaga Kerja dan tingkat suku bunga deposito terhadap variasi tingkat investasi Propinsi Jawa Tengah.

5.2 Pengujian Secara Serentak

Uji F digunakan untuk melihat bagaimana variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Pada persamaan nilai uji F adalah 4209,546 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian pada persamaan variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Angkatan Kerja dan tingkat suku bunga deposito secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat investasi Propinsi Jawa Tengah.

5.3 Analisis Koefisien Jangka Panjang

Berdasarkan nilai koefisien jangka pendek dari persamaan regresi yang dihasilkan di atas kemudian dihitung koefisien jangka panjang dengan rumus berikut :

$$\text{Konstanta} = \delta_0/1-\delta_5 \quad \text{LnTKt} = \delta_3/1-\delta_5$$

$$\text{LnPDRBt} = \delta_1/1-\delta_5 \quad \text{LnRRIILt} = \delta_4/1-\delta_5$$

$$\text{LnPPJTt} = \delta_2/1-\delta_5$$

Dari rumus di atas diperoleh koefisien regresi jangka panjang sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

TABEL 5.3
HASIL ESTIMASI PARAMETER PERTUMBUHAN JANGKA PANJANG

VARIABEL	ELASTISITAS JANGKA PENDEK	ELASTISITAS JANGKA PANJANG
Konstanta	8.486	14.143
LnPDRBt	0.618	23.572
LnPPJTt	2.263	3.771
LnTKt	0.628	1.046
LnRRIILt	-1.634	-2.723

Sumber : Data sekunder yang diolah

Pada penelitian ini model PAM dapat dijadikan penaksir untuk mengamati seberapa besar pengaruh variabel PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga kerja dan tingkat suku bunga riil terhadap perkembangan investasi di Jawa Tengah. Dengan demikian dapat dihitung pula koefisien jangka panjang PAM berturut-turut pada variabel PDRB, Pengeluaran Pemerintah, tenaga kerja dan tingkat suku bunga riil adalah : 23.572, 3.771, 1.046, dan -2.723. Hasil ini diperoleh dari koefisien jangka pendek dibagi 1- koefisien penyesuaian,

Sehingga fungsi investasi jangka panjang di Jawa Tengah menjadi:

$$\begin{aligned} \ln \text{INV}_t = & 14.143 + 23.572 \ln \text{PDRB}_t + 3.771 \ln \text{PPJT} + 1.046 \ln \text{TK}_t \\ & - 2.723 \ln \text{RRIIL}_t + 0.001 D \end{aligned}$$

5.3.1 Pengaruh PDRB Terhadap Investasi

Produk domestik regional bruto ternyata mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap investasi baik dalam jangka pendek terlebih lagi untuk jangka panjang. Koefisien regresi dan elastisitas sebesar 0.618 dalam jangka pendek menunjukkan bahwa dengan naiknya PDRB sebesar 1 persen, *ceteris paribus* akan menaikkan investasi sebesar 0.618 persen. Sedangkan dalam jangka panjang dimana koefisien regresi sebesar 23.572 berarti kenaikan PDRB sebesar 1 persen akan menaikkan minat berinvestasi sebesar 23.6 persen.

Pengaruh kenaikan PDRB yang begitu besar terhadap investasi sebenarnya adalah hal yang wajar mengingat dengan semakin besarnya pendapatan maka semakin kecil proporsi dari MPC, sebaliknya keinginan masyarakat untuk menabung yang akhirnya menjadi sumber dana untuk investasi makin besar. Selaras dengan

pendapat Rostow bahwa mobilisasi tabungan domestik diperlukan untuk menciptakan investasi yang cukup dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan mungkin terjadi salah satunya jika pendapatan masyarakat meningkat.

5.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi

Dalam jangka pendek, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap investasi adalah positif. Artinya semakin besar pengeluaran pemerintah maka minat para investor untuk menanamkan modal makin besar. Koefisien regresi jangka pendek sebesar 2.263 persen. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap (*ceteris paribus*) maka kenaikan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam APBD sebesar 1 persen akan mengakibatkan peningkatan investasi sebesar 2.263 persen.

Sedangkan dalam jangka panjang dimana koefisien regresi sebesar 3.771 berarti kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 persen akan menaikkan minat berinvestasi sebesar 3.771 persen.

Elastisitas jangka panjang relatif lebih besar hal ini menunjukkan bahwa para investor akan lebih tanggap dalam menyikapi dan mengambil keputusan untuk berinvestasi kaitannya dengan perkembangan pengeluaran pemerintah.

5.3.3 Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Investasi

Koefisien jangka pendek variabel ini positif pada angka 0,628. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata ketersediaan tenaga kerja berpengaruh secara positif terhadap minat para investor untuk berinvestasi. Setiap 1 persen tambahan ketersediaan tenaga kerja bisa menaikkan investasi sebesar 0,628 persen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang

terjadi pada berbagai sektor ekonomi cenderung untuk menggunakan tenaga manusia (padat karya) dibandingkan padat modal. Keputusan tersebut diambil atas dasar pertimbangan efisiensi maupun karena bidang usaha yang bersangkutan memang harus menggunakan lebih banyak tenaga manusia. Bidang usaha industri tekstil misalnya bisa dijadikan contoh.

Koefisien jangka panjang variabel tenaga kerja sebesar 1.046. Hal ini berarti untuk beberapa tahun kedepan para investor cenderung akan lebih banyak menggunakan tenaga manusia (*human capital*) dalam menjalankan investasinya.

5.3.4 Pengaruh Tingkat Suku Bunga Riil terhadap Investasi

Koefisien jangka pendek tingkat suku bunga riil sebesar -1.634 dan pengaruhnya terhadap investasi negatif. Ini berarti jika tingkat suku bunga naik sebesar 1 persen *ceteris paribus*, maka investasi hanya akan mengalami penurunan sebesar 1.634 persen dan sebaliknya. Koefisien jangka panjang sebesar - 2.723 menunjukkan bahwa dalam jangka panjang perubahan tingkat suku bunga akan berpengaruh terhadap para investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi, kenaikan tingkat suku bunga sebesar 1 persen akan menurunkan investasi sebesar 2.723 persen.

5.4 Uji Penyimpangan Klasik

Model analisis dalam penelitian ini secara teoritis akan menghasilkan nilai parameter penduga yang sah dipenuhi asumsi klasik regresi (uji ekonometri) yang meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Untuk itu, maka disini akan dilakukan uji asumsi klasik (Imam Ghozali, 2001 : 56-70).

Adapun pengujian terhadap asumsi klasik dengan bantuan program EViews 3.0 yang dilakukan pada penelitian ini meliputi :

5.4.1 Uji Multikolinieritas

Setelah dilakukan Uji Multikolinieritas pada variabel-variabel bebas dengan menggunakan *auxiliary regression*, hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel bebas pada model yang diajukan, bebas dari multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan dengan indikator kecilnya nilai R^2 pada *auxiliary regression* dari pada nilai R^2 pada model persamaan yang diajukan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel 5.4.

TABEL 5.4
PERBANDINGAN NILAI R^2

JENIS REGRESI	NILAI R^2
Regresi Model	0,998
Auxiliary Regression I	0,878
Auxiliary Regression II	0,584
Auxiliary Regression III	0,794
Auxiliary Regression IV	0,232

Sumber : Data sekunder yang diolah.

5.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Park dengan menggunakan EViews 3.0, dimana nantinya output dari uji tersebut berupa signifikansi dari variabel-variabel terhitung (JP_t , BSt_t , PJ_t , dan JPM_t). Bila output uji signifikan berarti terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sebaliknya bila output uji tidak signifikan berarti homoskedastisitas tidak dapat ditolak. Berikut adalah Tabel 5.5.

TABEL 5.5
SIGNIFIKANSI UJI PARK

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	16.458	12.018		1.503	.173
ln PDRBt	.468	.357	.680	1.810	.287
ln PPJT	.371	.357	.281	.829	.428
ln Tkt	-1.754	.854	-.961	-1.624	.334
Ln RRllLt	.438	.381	.361	1.654	.182
D	.001	.000	.001	.001	.100

b. Dependent Variabel: ln RRllLt
Sumber : Data sekunder yang diolah.

Terlihat pada tabel 5.5 signifikansi di atas bahwa variabel-variabel terhitung tidak signifikan (lebih besar dari $\alpha = 0,05$), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin Watson (DW)*. Dari regresi diperoleh angka DW sebesar 1,983 (dapat dilihat pada Lampiran 1). Karena model persamaan yang digunakan mempunyai variabel lag, maka uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan statistik h seperti yang disarankan Durbin Watson.

$$H = \left[1 - 0,5 (2,416) \right] \sqrt{\frac{23}{1 - 23 (0,005)}} = -1,061$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut ternyata nilai h terletak antara $-1,96$ dan $1,96$ atau $-1,96 < h < 1,96$. Hal ini berarti dengan derajat kepercayaan 5% tidak dapat menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi (positif atau negatif) dalam model.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Investasi merupakan bagian penting dalam proses pembangunan ekonomi baik dalam skala nasional maupun lokal. Hal ini mendapatkan momentumnya seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan semakin terbatasnya kemampuan dan peran pemerintah daerah dalam perekonomian, kebijakan untuk mengundang investor domestik dan asing dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian melalui investasi adalah sebuah pilihan logis.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di wilayah propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan model PAM diketahui bahwa beberapa variabel bisa mempengaruhi dan menjelaskan fenomena investasi sebagai berikut:

1. Produk domestik regional bruto ternyata mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap investasi baik dalam jangka pendek terlebih lagi untuk jangka panjang. Koefisien regresi dan elastisitas sebesar 0.618 dalam jangka pendek menunjukkan bahwa dengan naiknya PDRB sebesar 1 persen, ceteris paribus akan menaikkan investasi sebesar 0.618 persen. Sedangkan dalam jangka panjang dimana koefisien regresi sebesar 23.572 berarti kenaikan PDRB sebesar 1 persen akan menaikkan minat berinvestasi sebesar 23.572 persen. Pengaruh kenaikan PDRB yang begitu besar terhadap investasi sebenarnya adalah hal yang wajar mengingat dengan semakin besarnya pendapatan maka semakin kecil proporsi dari MPC, sebaliknya keinginan

masyarakat untuk menabung yang akhirnya menjadi sumber dana untuk investasi makin besar. Selaras dengan pendapat Rostow bahwa mobilisasi tabungan domestik diperlukan untuk menciptakan investasi yang cukup dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan mungkin terjadi salah satunya jika pendapatan masyarakat meningkat.

2. Dalam jangka pendek, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap investasi adalah positif. Artinya semakin besar pengeluaran pemerintah maka minat para investor untuk menanamkan modal makin besar. Koefisien regresi jangka pendek sebesar 2.263 persen. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap (*ceteris paribus*) maka kenaikan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam APBD sebesar 1 persen akan mengakibatkan peningkatan investasi sebesar 2.263 persen. Sedangkan dalam jangka panjang dimana koefisien regresi sebesar 3.771 berarti kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 persen akan menaikkan minat berinvestasi sebesar 3.771 persen.

Elastisitas jangka panjang relatif lebih besar hal ini menunjukkan bahwa para investor akan lebih tanggap dalam menyikapi dan mengambil keputusan untuk berinvestasi kaitannya dengan perkembangan pengeluaran pemerintah.

3. Koefisien jangka pendek variable tenaga kerja positif pada angka 0,628. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata ketersediaan tenaga kerja berpengaruh secara positif terhadap minat para investor untuk berinvestasi. Setiap 1 persen tambahan ketersediaan tenaga kerja bisa menaikkan investasi sebesar 0,628 persen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang terjadi pada berbagai sektor ekonomi cenderung untuk

menggunakan tenaga manusia (padat karya) dibandingkan padat modal. Keputusan tersebut diambil atas dasar pertimbangan efisiensi maupun karena bidang usaha yang bersangkutan memang harus menggunakan lebih banyak tenaga manusia. Bidang usaha industri tekstil misalnya bisa dijadikan contoh. Koefisien jangka panjang variable tenaga kerja sebesar 1.046. Hal ini berarti untuk beberapa tahun kedepan para investor cenderung akan lebih banyak menggunakan tenaga manusia (human capital) dalam menjalankan investasinya.

4. Koefisien jangka pendek tingkat suku bunga riil sebesar - 1,634 dan pengaruhnya terhadap investasi negatif. Ini berarti jika tingkat suku bunga naik sebesar 1 persen ceteris paribus, maka investasi akan mengalami penurunan sebesar 1,634 persen dan sebaliknya. Sedangkan koefisien jangka panjang sebesar -2.723 menunjukkan bahwa dalam jangka panjang perubahan tingkat suku bunga akan berpengaruh terhadap para investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi, kenaikan tingkat suku bunga sebesar 1 persen akan menurunkan investasi sebesar 2.723 persen.
5. Sebelum krisis moneter jumlah investasi di Jawa Tengah lebih besar, tetapi sejak terjadinya krisis moneter jumlah investasi menjadi lebih kecil dengan perbedaan sebesar 0.01 persen.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut beberapa saran yang bisa disampaikan:

1. Kebijakan pemerintah daerah propinsi Jawa Tengah untuk menarik para investor agar menanamkan modalnya tidak hanya dengan menggunakan instrumen ekonomi seperti tingkat suku bunga dan *tax holiday* serta berbagai fasilitas lain. Tapi juga diikuti dengan penyediaan berbagai sarana penunjang seperti transportasi, sumber energi, dan sarana komunikasi yang merata diberbagai wilayah yang dianggap potensial. Hal ini untuk mengurangi ketimpangan dalam investasi wilayah di JawaTengah. Penggunaan instrumen ekonomi semata juga seperti tingkat suku bunga ternyata tidak berpengaruh secara signifikan. Berbagai biaya tambahan (pungutan) yang sering muncul malah ditengarai sebagai penyebab munculnya ekonomi biaya tinggi dalam investasi.
2. Perhatian hendaknya difokuskan pada kontribusi PDRB Jawa Tengah yang ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap investasi. Melalui penggalangan dana masyarakat yang intensif dan efektif maka proses investasi bisa tetap berlangsung tanpa harus terlalu berharap pada investor asing.
3. Keberadaan tenaga kerja disatu sisi harus betul-betul diperhatikan terutama berkaitan dengan usaha-usaha peningkatan kualitasnya baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Karena dalam jangka panjang para investor terbukti lebih menyukai penggunaan tenaga kerja dalam sektor-sektor ekonomi dimana mereka melakukan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackley G, 1961, **Teori Ekonomi Makro**, LPFE UI, Jakarta Anonim, 1992, Profil Propinsi Republik Indonesia, Depdagri, Jakarta.
- Anwar F, 1999, "*Analisis Pengaruh Pendapatan Nasional, Tingkat Suku Bunga, Inflasi dan Dampak Deregulasi 1 juni 1983 Terhadap Investasi Swasta di Indonesia (1978-1996)*", **Skripsi Strata I**, FE UNDIP, Semarang.
- Aryanti, H.E, 1991, "*Faktor- Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Investasi PMDN dan PMA di Daerah Istimewa Yogyakarta*", **Skripsi Strata I**, FE UGM, Yogyakarta.
- Azis, Iwan Jaya dan Tawang Alun, 1985, **Prospek dan Permasalahan Ekonomi Indonesia**, FEUI, Sinar Harapan, Jakarta
- Boediono, 1982, **Ekonomi Moneter**, BPFE, Yogyakarta.
- Dumairy, 1999, **Perekonomian Indonesia**, Erlangga, Jakarta.
- Gujarati D, 1988, **Basic Econometrics**, McGraw-Hill Inc. London.
- Insukindro, 1990, "*Model Koreksi Kesalahan untuk Permintaan Impor Bahan Bakar Minyak di Indonesia*", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, No. 1 Tahun V.
- , 1993, *Ekonomi Uang dan Bank: Teori dan Pengalaman di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta
- Kuncoro M, 2001, *Metode Kuantitatif; Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta

- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave, 1993, **Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek**, Edisi Kelima, Alih Bahasa: Alfonsius Sirait. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nopirin , 1998, **Ekonomi Moneter**, BPFE, Yogyakarta.
- Radianto E, 1999, "*Spesifikasi Dinamis, Model Investasi jangka Panjang; Sebuah Studi Kasus di Maluku*", Jurnal ekonomi dan Bisnis Indonesia, No. 3 Tahun XV.
- Suparmoko, M, 1994, **Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek**, Edisi Keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Sukirno S, 1985, **Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah**, FEUI, Jakarta.
- Suseno Friyanto Widodo H G, 1990, **Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia**, Kanisius, Yogyakarta
- Swasono Y, 1988, **Ekonomi Sumber Daya Manusia**, Karunika, Jakarta.
- T. Gilarso, 1999, **Ekonomi Indonesia Sebuah Pengantar**, Kanisius, Yogyakarta
- Todaro M. P, 1993, **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, Erlangga Jakarta.
- Prijono Tjiptoheriyanto, 1997, **Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-undang No. 25 1999, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Sejahtera Mandiri, Jakarta.
- Zaris R, 1987, *Perspektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, LPFE UI, Jakarta.